



# LAPORAN KINERJA DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

## TAHUN 2023

Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut tahun 2023 selesai disusun. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang meliputi perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, review dan evaluasi kinerja, sesuai amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas yang dipercayakan atas penggunaan anggaran tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut tahun 2023 ini dapat dimanfaatkan oleh semua pihak yang membutuhkan.

Jakarta, Desember 2023  
Plt. Direktur Pengendalian Kerusakan  
Ekosistem Gambut



*C. H. Nety Widayati*  
**Dra. C. H. Nety Widayati, M.T**  
NIP. 19691225 199503 2 001

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014. Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut.

Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut tahun 2023 yang terdiri dari 8 sasaran kegiatan dan 12 (dua belas) indikator kinerja kegiatan beserta targetnya. Adapun rinciannya dapat dilihat pada **Tabel 1.** berikut:

**Tabel. i** Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Gambut	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	IKEG = 67,3
2.	Tersedianya Data dan Informasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut-nya pada skala 1:50.000	48 KHG
		Jumlah KHG yang ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000	30 KHG
		Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG)	12 layanan
3.	Terlaksananya layanan penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Jumlah industri yang dilakukan penilaian kinerja pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut	330 Perusahaan
4.	Terpulihkannya KHG yang terdegradasi	Luas KHG (Ha) yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya (lahan masyarakat)	1.050 Hektar
5.	Terfasilitasinya dan terbinaanya pemerintah daerah dalam pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut	Jumlah desa yang difasilitasi dalam menjaga Ekosistem Gambut	60 Desa
		Tersedianya Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut di provinsi dan kabupaten/kota	23 Provinsi 134 kabupaten/kota

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan program Gambut Lestari	23 Provinsi 134 kabupaten/kota
6.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat PKEG	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP = 78
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan SPIP tahun 2023	Jumlah kegiatan penyelenggaraan SPIP	1 Kegiatan
8.	Terlaksananya Dialog Kinerja	Jumlah pelaksanaan Dialog Kinerja	3 Pertemuan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut mempunyai 2 (dua) unit subdirektorat, 1 (satu) unit kelompok jabatan fungsional, dan 1 (satu) unit subbagian, yaitu:

1. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
2. Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut;
3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Subbagian Tata Usaha.

Sasaran unit kegiatan masing-masing subdirektorat dan subbagian adalah:

1. Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan ekosistem gambut;
2. Efektifitas pengendalian sumber kerusakan ekosistem gambut; dan
3. Efektifitas layanan perkantoran.

Dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja kegiatan Direktorat PKEG pada tahun 2023 sudah sesuai dengan target beban yang direncanakan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2023, diperoleh capaian kinerja rata-rata sebesar 100,59%, sedangkan capaian penyerapan anggarannya sebesar 99,53% untuk APBN Murni dan 95,68% untuk APBN dan Hibah.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	3
D. Sumber Daya Manusia	4
E. Keuangan	4
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024	8
B. Rencana Kerja Tahun 2023	10
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Metode Pengukuran	16
1. Pengukuran Kinerja	16
2. Pengukuran Penyerapan Anggaran	16
3. Pengukuran Efektifitas dan Efisiensi	16
B. Capaian Kinerja	17
C. Capaian Realisasi Anggaran	50
D. Capaian Efisiensi Kinerja	52
BAB IV. PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Kendala	55
C. Tindak Lanjut	55

## DAFTAR TABEL

Tabel i.	Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023	iii.
Tabel 1.	Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023	4
Tabel 2.	Rincian Alokasi Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023	5
Tabel 3.	Penjabaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	9
Tabel 4.	Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023	10
Tabel 5.	Rencana Kegiatan dan APBN Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023	12
Tabel 6.	Rincian Kegiatan bersumber Hibah di Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023	14
Tabel 7.	Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023	15
Tabel 8.	Capaian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023	18
Tabel 9.	IKEG Nasional dari tahun 2020 hingga 2023	20
Tabel 10.	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Provinsi Tahun 2023	20
Tabel 11.	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Kabupaten/Kota Tahun 2023	21
Tabel 12.	Rekapitulasi KHG yang Diinventarisasi Tahun 2020 – 2023	25
Tabel 13.	Data Usulan Penetapan Peta Karakteristik Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 Tahun 2023	33
Tabel 14.	Jumlah Kabupaten/Kota yang telah Dilakukan Sosialisasi RPPEG di Tahun 2023	27
Tabel 15.	Rincian Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Konsesi Per Bulan Desember 2023	34
Tabel 16.	Nilai Ketaatan pada Kriteria Penilaian Aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	38
Tabel 17.	Program Kemandirian Masyarakat Tahun 2020-2023	40
Tabel 18.	Sebaran Lokasi Pembangunan Sekat Kanal Tahun 2023	45
Tabel 19.	Capaian Penyerapan Anggaran (APBN dan Hibah) Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023	52
Tabel 20.	Efisiensi Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023	54

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	4
Gambar 2.	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)	19
Gambar 3.	Jumlah Inventarisasi KHG Tiap Tahunnya Dari Tahun 2015 Hingga Tahun 2023	30
Gambar 4.	Tahapan Pelaksanaan PROPER secara umum	35
Gambar 5.	Sosialisasi Kriteria penilaian PROPER oleh Dirjen PPKL kepada Perkebunan dan PBPH	35
Gambar 6.	Sistem Pelaporan Elektronik Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Simpel.Menlhk.Go.Id) Yang Telah Mengintegrasikan Aspek Pelaporan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	36
Gambar 7.	Dokumentasi verifikasi lapangan penilaian PROPER	36
Gambar 8.	Grafik Persentase Ketaatan Setiap Aspek Penilaian Pada Saat Rapor Sementara Dan Rapor Final (Akhir)	37
Gambar 9.	Grafik Nilai Ketaatan Pada Kriteria Penilaian Aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	38
Gambar 10.	Pembuatan Gula Merah dari Nira Sawit di Sumatera Utara	43
Gambar 11.	Peternakan Ayam di Sumatera Utara	43
Gambar 12.	Peternakan Sapi di Sumatera Selatan	43
Gambar 13.	Budidaya Kerbau Rawa di Sumatera Selatan	44
Gambar 14.	Budidaya Ikan Lele di Sumatera Utara	44
Gambar 15.	Mutual Check Pra Pembangunan Sekat Kanal	45
Gambar 16.	Mobilisasi Material untuk Pembangunan Sekat Kanal	45
Gambar 17.	Pemasangan Cerucuk, Geotextille dan Soilbag pada Pembangunan Sekat Kanal	45
Gambar 18.	Pemasangan Papan Peluncur pada Pembangunan Sekat Kanal	45
Gambar 19.	Sekat Kanal Selesai Dibangun	45
Gambar 20.	Sekat Kanal Selesai Dibangun	45
Gambar 21.	Demonstrasi Aplikasi SiMATAG-0,4 m	46
Gambar 22.	Frekuensi dan Sebaran Titik Panas (Hotspot) periode Januari – November 2023 di Provinsi Sumatera Selatan	48
Gambar 23.	Aksi Pembasahan (Rewetting System) Melalui Pembangunan Sekat Kanal di Lahan Masyarakat, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tahun 2023	49

## **BAB I** **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelaporan kinerja merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban setiap instansi pemerintah terhadap pelaksanaan program dan anggaran. Pelaporan kinerja adalah rangkaian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2014. Pada Pasal 5 peraturan tersebut menyebutkan bahwa SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja.

Untuk menindaklanjuti dikeluarkannya PP No. 29 Tahun 2014, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mengeluarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Laporan Kinerja disusun berdasarkan perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut merupakan salah satu unit eselon II di Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja berdasarkan penetapan kinerja tahun 2023. Penetapan kinerja tahun 2023 mengacu pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Berdasarkan amanat tersebut maka dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023.



## **B. Tugas dan Fungsi**

Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan ekosistem gambut;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut;
3. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut;
4. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan perlindungan dan pengelolaan, pengendalian kerusakan, dan pengawasan pengelolaan ekosistem gambut; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

### **1. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut**

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

### **2. Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut;**

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan supervisi, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan bina pengendalian kerusakan ekosistem gambut.

### **3. Subbagian Tata Usaha**

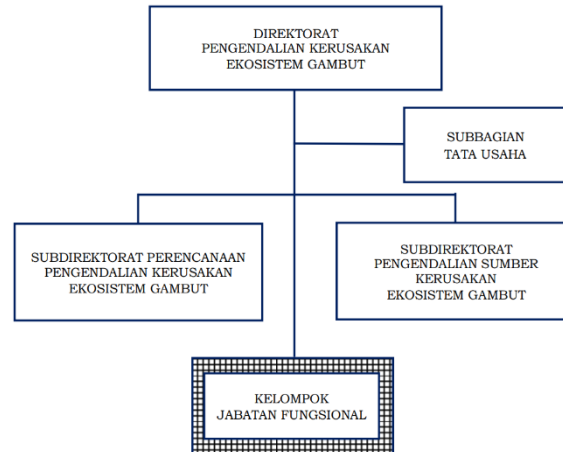
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut.

## **C. Struktur Organisasi**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.15/MenLHK/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, menyebutkan bahwa Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut terdiri atas:

1. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut;
2. Subdirektorat Pengendalian Sumber Kerusakan Ekosistem Gambut;
3. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
4. Subbagian Tata Usaha.

Secara lengkap struktur organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



**Gambar 1.** Struktur Organisasi Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

#### D. Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut tahun 2023 adalah sebanyak 26 orang PNS yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 2 orang pejabat eselon III (2 orang Kasubdit.), 1 orang pejabat eselon IV (1 orang Kasubbag.), 14 orang fungsional tertentu, dan 13 orang pelaksana. Berdasarkan tingkat pendidikan, yaitu 8 orang Strata II (Magister), 20 orang Strata I (Sarjana), 1 orang DIII, 1 orang SLTA dan 1 orang SD. Secara rinci sumber daya manusia yang ada seperti yang terlihat pada Tabel 1 berikut ini.

**Tabel 1.** Sumber Daya Manusia Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023

No.	Unit Kerja	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	-	8	20	1	1	-	1	31

#### E. Keuangan

Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut untuk tahun 2023 yakni sebesar Rp. 17.781.614.000,- (tujuh belas milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta enam ratus empat belas ribu rupiah) untuk APBN Murni atau Rp. 32.777.390.000,- (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh rupiah) untuk APBN dan Hibah dengan rincian alokasi sebagai berikut:

**Tabel 2.** Rincian Alokasi Anggaran DIPA Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023

**ALOKASI APBN MURNI**

KODE	URAIAN	JUMLAH
		<b>17.781.614.000</b>
<b>6033.QMA.006</b>	<b>Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut</b>	<b>2.105.700.000</b>
51	Tersedianya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000	1.589.790.000
A	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut	1.516.636.000
B	Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 pada Kesatuan Hidrologis Gambut	73.154.000
C	Pencadangan Anggaran	
52	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	515.910.000
A	Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	143.378.000
B	Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	372.532.000
<b>6034.QDI.004</b>	<b>Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut</b>	<b>443.200.000</b>
51	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	443.200.000
A	Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut	250.914.000
B	Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	192.286.000
C	Pencadangan Anggaran	
<b>6035.REA.002</b>	<b>Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya</b>	<b>1.814.696.000</b>
51	Pemulihan Lahan Gambut Terdegradasi di Areal Penggunaan Lainnya	1.814.696.000
A	Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat	1.814.696.000
B	Pencadangan Anggaran	
<b>6035.UBA.002</b>	<b>Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut</b>	<b>680.420.000</b>
51	Pelaksanaan Gerakan Gambut Lestari	680.420.000
A	Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD)	235.139.000
B	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	445.281.000
C	Pencadangan Anggaran	
<b>6035.UBB.001</b>	<b>Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi</b>	<b>12.737.598.000</b>
51	Fasilitasi desa dalam menjaga ekosistem gambut	12.737.598.000
A	Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut	12.737.598.000
B	Pencadangan Anggaran	

**ALOKASI APBN dan HIBAH**

KODE	URAIAN	JUMLAH
		<b>32.777.390.000</b>
<b>6033.QMA.006</b>	<b>Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut</b>	<b>17.101.476.000</b>
51	Tersedianya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000	16.585.566.000
A	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut	1.516.636.000
B	Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 pada Kesatuan Hidrologis Gambut	73.154.000
C	Pencadangan Anggaran	
D	INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI), C.1 Kapasitas Kelembagaan, kerangka kerja Kemitraan untuk meningkatkan operasional restorasi lahan gambut yang berkelanjutan	4.245.904.000
E	INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI), C.2 Pengelolaan terpadu Kesatuan Hidrologis Gambut prioritas di provinsi Proyek berkelanjutan	7.857.906.000
F	INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI), C.4 PMO Project Management	1.149.537.000
G	Sustainable Management of Peatland Ecosystems in Indonesia (SMPEI)	1.722.465.000
H	INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDS	19.964.000
52	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	515.910.000
A	Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	143.378.000
B	Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	372.532.000
<b>6034.QDI.004</b>	<b>Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut</b>	<b>443.200.000</b>
51	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	443.200.000
A	Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut	250.914.000
B	Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	192.286.000
C	Pencadangan Anggaran	
<b>6035.REA.002</b>	<b>Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya</b>	<b>1.814.696.000</b>
51	Pemulihan Lahan Gambut Terdegradasi di Areal Penggunaan Lainnya	1.814.696.000
A	Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat	1.814.696.000
B	Pencadangan Anggaran	
<b>6035.UBA.002</b>	<b>Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut</b>	<b>680.420.000</b>
51	Pelaksanaan Gerakan Gambut Lestari	680.420.000
A	Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD)	235.139.000
B	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	445.281.000

KODE	URAIAN	JUMLAH
C	Pencadangan Anggaran	
<b>6035.UBB.001</b>	<b>Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi</b>	<b>12.737.598.000</b>
51	Fasilitasi desa dalam menjaga ekosistem gambut	12.737.598.000
A	Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut	12.737.598.000
B	Pencadangan Anggaran	

## **BAB II** **PERENCANAAN KINERJA**

### **A. Rencana Strategis Tahun 2020-2024**

Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan pelaksanaan program yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020–2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Berdasarkan Sasaran Strategis yang tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020–2024, Sasaran Strategis Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2020–2024 adalah melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumber daya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Sasaran program Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut, dengan Indikator Kinerja Program (IKP) adalah luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan meningkat setiap tahun yaitu 1.800 Ha pada tahun 2020, 18.200 Ha pada tahun 2021, 25.000 Ha pada tahun 2022, 25.000 Ha pada tahun 2023 dan 30.000 Ha pada tahun 2024. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 maka komitmen Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut untuk mewujudkan tercapainya sasaran program tersebut dinyatakan dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut yang memuat Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut.

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut disampaikan pada tabel berikut.

**Tabel 3.** Penjabaran Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang terkait langsung dengan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

**Tujuan**  
**Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**  
**Tahun 2020 - 2024**

---

“Pemeliharaan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup yang Komprehensif”

**Indikator Tujuan**

1. Tercapainya kualitas udara yang sehat;
2. Tercapainya peningkatan kualitas air;
3. Tercapainya pemulihan lahan akses terbuka;
4. Tercapainya pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang ramah lingkungan;
5. Tercapainya pemulihan ekosistem lahan gambut;
6. Terlaksananya reformasi birokrasi.

**Sasaran Program**

1. Meningkatnya kualitas udara;
2. Meningkatnya kualitas air;
3. Meningkatnya kualitas tutupan lahan;
4. Menurunnya beban pencemaran dan tingkat kerusakan wilayah pesisir dan laut;
5. **Meningkatnya kualitas ekosistem gambut;**
6. Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan.

**Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut**

1. Terpulihkannya ekosistem gambut;
2. Meningkatnya proporsi jumlah perusahaan konsesi di ekosistem gambut yang meningkat kinerja tata pengelolaan airnya.

**Sasaran Unit Kegiatan Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut**

1. Tersedianya data dan informasi inventarisasi dan penetapan ekosistem gambut;
2. Efektifitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
3. Efektifitas pemulihan KHG.



## B. Rencana Kerja Tahun 2023

Sasaran Program Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023 adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lahan gambut, dengan indikator kinerja utamanya adalah:

**Tabel 4.** Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Gambut	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	IKEG = 67,3	IKEG = 69,13	102,71%
2.	Tersedianya Data dan Informasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut-nya pada skala 1:50.000	48 KHG	48 KHG	100%
		Jumlah KHG yang ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000	30 KHG	30 KHG	100%
		Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG)	12 layanan	12 layanan	100%
3.	Terlaksananya layanan penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Jumlah industri yang dilakukan penilaian kinerja pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut	330 Perusahaan	330 Perusahaan	100%
4.	Terpulihkannya KHG yang terdegradasi	Luas KHG (Ha) yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya (lahan masyarakat)	1.050 Hektar	1.105 Hektar	105,23%
5.	Terfasilitasinya dan terbinanya pemerintah daerah dalam pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut	Jumlah desa yang difasilitasi dalam menjaga Ekosistem Gambut	60 Desa	60 Desa	100%
		Tersedianya Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut di provinsi dan kabupaten/kota	23 Provinsi 134 kabupaten/kota	23 Provinsi 134 kabupaten/kota	100%
		Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan program Gambut Lestari	23 Provinsi 134 kabupaten/kota	23 Provinsi 134 kabupaten/kota	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
6.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat PKEG	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP = 78,00	Nilai SAKIP = 77,39	99,21%
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan SPIP tahun 2023	Jumlah kegiatan penyelenggaraan SPIP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
8.	Terlaksananya Dialog Kinerja	Jumlah pelaksanaan Dialog Kinerja	3 Pertemuan	3 Pertemuan	100%

Sasaran unit kegiatan di Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut adalah:

1. Efektifitas perencanaan pengendalian kerusakan ekosistem gambut; dan
2. Efektifitas pengendalian sumber kerusakan ekosistem gambut.

Dalam melaksanakan programnya, Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut mempunyai dua sumber dana tergantung dari jenis kegiatannya, yakni sumber APBN dan sumber Hibah. Adapun PAGU kegiatan dari sumber APBN sejumlah Rp. 17.781.614.000 dan anggaran dari sumber Hibah sejumlah Rp. 14.995.776.000, sehingga total anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut pada tahun 2023 adalah sejumlah Rp. 32.777.390.000 (tiga puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus sembilan puluh rupiah).

## 1. APBN

Berikut ini diuraikan secara rinci rencana APBN Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut tahun 2023:

**Tabel 5.** Rencana Kegiatan dan APBN Murni Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH
		<b>17.781.614.000</b>
<b>6033.QMA.006</b>	<b>Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut</b>	<b>2.105.700.000</b>
51	Tersedianya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000	1.589.790.000
A	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut	1.516.636.000
B	Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 pada Kesatuan Hidrologis Gambut	73.154.000
C	Pencadangan Anggaran	
52	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	515.910.000
A	Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	143.378.000
B	Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	372.532.000
<b>6034.QDI.004</b>	<b>Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut</b>	<b>443.200.000</b>
51	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	443.200.000
A	Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut	250.914.000
B	Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	192.286.000
C	Pencadangan Anggaran	
<b>6035.REA.002</b>	<b>Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya</b>	<b>1.814.696.000</b>
51	Pemulihan Lahan Gambut Terdegradasi di Areal Penggunaan Lainnya	1.814.696.000
A	Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat	1.814.696.000
B	Pencadangan Anggaran	
<b>6035.UBA.002</b>	<b>Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut</b>	<b>680.420.000</b>
51	Pelaksanaan Gerakan Gambut Lestari	680.420.000
A	Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD)	235.139.000
B	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	445.281.000
C	Pencadangan Anggaran	

KODE	URAIAN	JUMLAH
<b>6035.UBB.001</b>	<b>Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi</b>	<b>12.737.598.000</b>
51	Fasilitasi desa dalam menjaga ekosistem gambut	12.737.598.000
A	Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut	12.737.598.000
B	Pencadangan Anggaran	

## 2. APBN dan Hibah

Berikut ini diuraikan secara rinci rencana anggaran Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut tahun 2023:

**Tabel 6.** Rincian Kegiatan bersumber Hibah di Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH
		<b>32.777.390.000</b>
<b>6033.QMA.006</b>	<b>Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut</b>	<b>17.101.476.000</b>
51	Tersedianya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000	16.585.566.000
A	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut	1.516.636.000
B	Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 pada Kesatuan Hidrologis Gambut	73.154.000
C	Pencadangan Anggaran	
D	INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI), C.1 Kapasitas Kelembagaan, kerangka kerja Kemitraan untuk meningkatkan operasional restorasi lahan gambut yang berkelanjutan	4.245.904.000
E	INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI), C.2 Pengelolaan terpadu Kesatuan Hidrologis Gambut prioritas di provinsi Proyek berkelanjutan	7.857.906.000
F	INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI), C.4 PMO Project Management	1.149.537.000
G	Sustainable Management of Peatland Ecosystems in Indonesia (SMPEI)	1.722.465.000
H	INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDS	19.964.000
52	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	515.910.000
A	Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	143.378.000

KODE	URAIAN	JUMLAH
B	Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	372.532.000
<b>6034.QDI.004</b>	<b>Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut</b>	<b>443.200.000</b>
51	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	443.200.000
A	Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut	250.914.000
B	Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	192.286.000
C	Pencadangan Anggaran	
<b>6035.REA.002</b>	<b>Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya</b>	<b>1.814.696.000</b>
51	Pemulihan Lahan Gambut Terdegradasi di Areal Penggunaan Lainnya	1.814.696.000
A	Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat	1.814.696.000
B	Pencadangan Anggaran	
<b>6035.UBA.002</b>	<b>Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut</b>	<b>680.420.000</b>
51	Pelaksanaan Gerakan Gambut Lestari	680.420.000
A	Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD)	235.139.000
B	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	445.281.000
C	Pencadangan Anggaran	
<b>6035.UBB.001</b>	<b>Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi</b>	<b>12.737.598.000</b>
51	Fasilitasi desa dalam menjaga ekosistem gambut	12.737.598.000
A	Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut	12.737.598.000
B	Pencadangan Anggaran	

### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 7.** Perjanjian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Gambut	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	IKEG = 67,3
2.	Tersedianya Data dan Informasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut-nya pada skala 1:50.000	48 KHG
		Jumlah KHG yang ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000	30 KHG
		Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG)	12 layanan
3.	Terlaksananya layanan penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Jumlah industri yang dilakukan penilaian kinerja pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut	330 Perusahaan
4.	Terpulihkannya KHG yang terdegradasi	Luas KHG (Ha) yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya (lahan masyarakat)	1.050 Hektar
5.	Terfasilitasinya dan terbinanya pemerintah daerah dalam pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut	Jumlah desa yang difasilitasi dalam menjaga Ekosistem Gambut	60 Desa
		Tersedianya Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut di provinsi dan kabupaten/kota	23 Provinsi 134 kabupaten/kota
		Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan program Gambut Lestari	23 Provinsi 134 kabupaten/kota
6.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat PKEG	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP = 78
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan SPIP tahun 2023	Jumlah kegiatan penyelenggaraan SPIP	1 Kegiatan
8.	Terlaksananya Dialog Kinerja	Jumlah pelaksanaan Dialog Kinerja	3 Pertemuan

## **BAB III** **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Metode Pengukuran**

#### **1. Pengukuran Kinerja**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program yang ditetapkan dalam mewujudkan tujuan instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target penetapan kinerja. Semakin tinggi realisasi kinerja, semakin baik pencapaian indikator kinerja. Rumus pengukuran kinerja adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Kegiatan}}{\text{Rencana (Target)}} \times 100$$

#### **2. Pengukuran Penyerapan Anggaran**

Penyerapan anggaran dihitung dengan membandingkan antara realisasi penggunaan anggaran dengan rencana anggaran (pagu). Semakin tinggi realisasi penggunaan anggaran, semakin baik capaian penyerapan anggarannya. Rumus perhitungan capaian penyerapan anggaran adalah sebagai berikut:

$$\text{Capaian Penyerapan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Rencana (Pagu)}} \times 100$$

#### **3. Pengukuran Efektifitas dan Efisiensi**

Perhitungan efektifitas kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka capaian kinerja tahun ini lebih efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu. Tetapi apabila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka capaian kinerja tahun ini kurang efektif dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja Tahun Ini (\%)}}{\text{Capaian Kinerja Tahun Lalu (\%)}}$$

Efisiensi kinerja dihitung dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran. Apabila hasil perbandingan tersebut lebih dari satu maka pelaksanaan kegiatan dapat dikatakan efisien, sedangkan bila hasil perbandingan tersebut kurang dari satu maka pelaksanaan kegiatan tidak efisien.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja (\%)}}{\text{Capaian Penyerapan Anggaran (\%)}}$$

## B. Capaian Kinerja

Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut memiliki 8 (delapan) Sasaran Kegiatan dan 12 (dua belas) Indikator Kinerja Kegiatan yang harus dicapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target pencapaian kinerja.

**Tabel 8.** Capaian Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Gambut	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	IKEG = 67,3	IKEG = 69,13	102,71%
2.	Tersedianya Data dan Informasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut-nya pada skala 1:50.000	48 KHG	48 KHG	100%
		Jumlah KHG yang ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000	30 KHG	30 KHG	100%
		Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG)	12 layanan	12 layanan	100%
3.	Terlaksananya layanan penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Jumlah industri yang dilakukan penilaian kinerja pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut	330 Perusahaan	330 Perusahaan	100%
4.	Terpulihkannya KHG yang terdegradasi	Luas KHG (Ha) yang dipulihkan di areal	1.050 Hektar	1.105 Hektar	105,23%

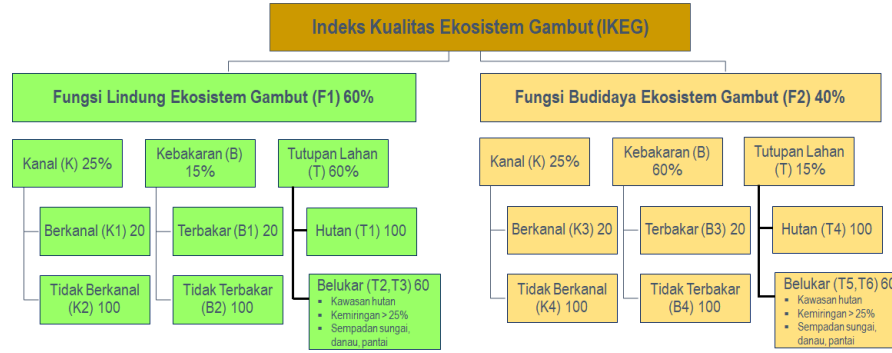


No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
		penggunaan lainnya (lahan masyarakat)			
5.	Terfasilitasinya dan terbinanya pemerintah daerah dalam pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut	Jumlah desa yang difasilitasi dalam menjaga Ekosistem Gambut	60 Desa	60 Desa	100%
Tersedianya Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut di provinsi dan kabupaten/kota		23 Provinsi 134 kabupaten/kota	23 Provinsi 134 kabupaten/kota	100%	
Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan program Gambut Lestari		23 Provinsi 134 kabupaten/kota	23 Provinsi 134 kabupaten/kota	100%	
6.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat PKEG	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP = 78,00	Nilai SAKIP = 77,39	99,21%
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan SPIP tahun 2023	Jumlah kegiatan penyelenggaraan SPIP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
8.	Terlaksananya Dialog Kinerja	Jumlah pelaksanaan Dialog Kinerja	3 Pertemuan	3 Pertemuan	100%

Berikut ini diuraikan masing-masing indikator kinerja tersebut.

### 1. Meningkatnya Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

Perhitungan IKEG dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi ekosistem gambut, yaitu fungsi lindung atau fungsi budi daya. Parameter yang digunakan adalah kanal, kejadian kebakaran hutan/lahan serta penutupan lahan. Formulasi perhitungan IKEG dapat dilihat pada Gambar 2 di bawah ini.



**Gambar 2.** Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG)

Perhitungan IKEG dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{IKEG} = w_1 * \text{Kanal} + w_2 * \text{Areal Terbakar} + w_3 * \text{Tutupan Lahan}$$

*Keterangan:*

$w_{1-3}$  = bobot tiap parameter

Data yang digunakan dalam perhitungan IKEG adalah Peta FEG skala 1:50.000 olahan Tahun 2023, Peta Kanal Komposit 2022, Data Areal Terbakar pada tahun 2022, dan Data Tutupan Lahan tahun 2022. Untuk perhitungan IKEG secara nasional, didapatkan bahwa nilai IKEG Nasional pada tahun 2023 adalah 69,13, dimana target tahun 2023 yakni 67,35. Adapun perbandingan target dan capaian IKEG dari tahun 2020 – 2023 dapat dilihat pada Tabel 11 berikut.

**Tabel 9.** IKEG Nasional dari tahun 2020 hingga 2023

Tahun	Rata-rata IKEG Nasional	Target
2020	65,70	65,85
2021	67,98	66,35
2022	64,90	66,85
2023	69,13	67,35

Variabel luasan daerah terdampak kanal adalah salah satu komponen variable penyusun IKEG yang berbanding terbalik. Diidentifikasi bahwa kenaikan nilai IKEG secara signifikan terjadi karena adanya pemekaran 4 provinsi baru di region Papua.

## 2. Jumlah Data Kualitas Ekosistem Gambut Provinsi

Pada tahun 2023, sudah dilakukan proses perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) pada 23 provinsi dan 134 kabupaten/kota.

**Tabel. 10** Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Provinsi Tahun 2020-2023

Pulau	Provinsi	Tahun			
		2020	2021	2022	2023
Sumatera	Aceh	57.81	71.45	71.15	69.53
Sumatera	Bengkulu	58.50	58.50	44.44	43.99
Sumatera	Jambi	69.14	71.10	64.09	60.85
Sumatera	Kep. Bangka Belitung	79.51	78.93	78.39	75.52
Sumatera	Kep. Riau	63.08	63.34	63.58	63.70
Sumatera	Lampung	45.38	46.58	43.22	41.43
Sumatera	Riau	67.49	72.21	66.54	66.19
Sumatera	Sumatera Barat	52.91	51.97	46.64	44.09
Sumatera	Sumatera Selatan	61.70	66.18	64.34	61.85
Sumatera	Sumatera Utara	46.20	46.27	42.35	42.38
Kalimantan	Kalimantan Barat	74.26	75.22	77.25	70.55
Kalimantan	Kalimantan Selatan	53.15	56.47	49.63	49.19
Kalimantan	Kalimantan Tengah	78.97	80.42	79.10	75.75
Kalimantan	Kalimantan Timur	71.35	72.33	71.17	69.72
Kalimantan	Kalimantan Utara	84.04	84.90	79.49	79.20
Sulawesi	Sulawesi Barat	52.94	52.99	47.93	47.94
Sulawesi	Sulawesi Tengah	51.75	51.75	52.55	53.48
Papua	Papua	84.53	94.05	94.78	96.14
Papua	Papua Barat	96.32	96.97	96.87	96.75
Papua	Papua Barat Daya				97.49
Papua	Papua Pegunungan				97.14
Papua	Papua Selatan				91.31
Papua	Papua Tengah				95.77

**Tabel. 11** Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023

Pulau	Provinsi	Kota/Kabupaten	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
Sumatera	Aceh	Kab. Aceh Barat	59.19	57.54	55.17	55.14
Sumatera	Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	50.22	50.07	45.83	45.71
Sumatera	Aceh	Kab. Aceh Jaya	58.28	57.26	55.74	56.85
Sumatera	Aceh	Kab. Aceh Selatan	63.48	86.29	87.27	84.73
Sumatera	Aceh	Kab. Aceh Singkil	55.86	73.85	74.65	71.65
Sumatera	Aceh	Kab. Nagan Raya	50.85	50.55	46.88	46.98
Sumatera	Aceh	Kota Subulussalam	54.99	70.09	70.30	66.63
Sumatera	Bengkulu	Kab. Muko Muko	58.50	58.50	44.44	43.99
Sumatera	Jambi	Kab. Merangin	43.13	44.36	40.07	38.58
Sumatera	Jambi	Kab. Muaro Jambi	69.91	73.70	66.35	60.24
Sumatera	Jambi	Kab. Sarolangun	42.60	43.36	39.85	39.90
Sumatera	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	63.86	64.62	54.69	53.64
Sumatera	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	74.44	75.30	69.09	67.57

Pulau	Provinsi	Kota/Kabupaten	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
Sumatera	Jambi	Kota Jambi	85.16	85.16	75.37	75.44
Sumatera	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka	70.46	70.20	69.39	65.00
Sumatera	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Barat	78.90	79.55	78.97	76.94
Sumatera	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Selatan	76.89	77.09	76.89	68.73
Sumatera	Kepulauan Bangka Belitung	Kab. Bangka Tengah	85.01	82.99	82.42	82.51
Sumatera	Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	58.34	58.60	57.28	57.40
Sumatera	Kepulauan Riau	Kab. Karimun	63.08	63.34	63.58	63.70
Sumatera	Lampung	Kab. Lampung Tengah	52.45	52.45	47.30	47.26
Sumatera	Lampung	Kab. Lampung Timur	75.28	75.57	77.59	64.55
Sumatera	Lampung	Kab. Mesuji	41.56	43.28	39.46	39.46
Sumatera	Lampung	Kab. Tulang Bawang	41.27	41.27	38.89	39.00
Sumatera	Riau	Kab. Bengkalis	70.13	75.66	68.06	67.90
Sumatera	Riau	Kab. Indragiri Hilir	60.64	61.77	58.25	58.50
Sumatera	Riau	Kab. Indragiri Hulu	57.30	80.24	74.79	73.18
Sumatera	Riau	Kab. Kampar	52.21	50.32	43.05	43.31
Sumatera	Riau	Kab. Kepulauan Meranti	74.43	82.44	75.62	70.98
Sumatera	Riau	Kab. Pelalawan	76.71	82.15	74.38	75.25
Sumatera	Riau	Kab. Rokan Hilir	61.59	62.31	55.00	53.81
Sumatera	Riau	Kab. Rokan Hulu	46.58	47.84	45.85	44.73
Sumatera	Riau	Kab. Siak	73.64	78.93	73.23	73.92
Sumatera	Riau	Kota Dumai	73.50	74.84	64.09	67.30
Sumatera	Riau	Kota Pekanbaru	57.94	58.01	54.04	53.98
Sumatera	Sumatera Barat	Kab. Agam	45.22	45.22	41.28	41.29
Sumatera	Sumatera Barat	Kab. Pasaman Barat	44.66	44.68	40.43	40.46
Sumatera	Sumatera Barat	Kab. Pesisir Selatan	55.25	54.06	48.42	44.87
Sumatera	Sumatera Selatan	Kab. Banyuasin	57.03	58.77	59.84	53.17
Sumatera	Sumatera Selatan	Kab. Muara Enim	64.59	66.10	61.44	59.31
Sumatera	Sumatera Selatan	Kab. Musi Banyuasin	54.03	63.44	61.72	60.11
Sumatera	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas	67.77	53.02	49.54	50.84
Sumatera	Sumatera Selatan	Kab. Musi Rawas Utara	47.74	47.15	43.53	43.13
Sumatera	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Ilir	85.00	87.81		
Sumatera	Sumatera Selatan	Kab. Ogan Komering Ilir	67.59	72.96	69.06	68.49
Sumatera	Sumatera Selatan	Kab. PALI	41.39	43.18	39.28	39.89
Sumatera	Sumatera Utara	Kab. Asahan	47.70	47.74	43.51	43.52
Sumatera	Sumatera Utara	Kab. Humbang Hasundutan	58.00	58.00	58.00	84.54
Sumatera	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu	47.41	47.72	43.25	43.40
Sumatera	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Selatan	42.46	42.46	38.99	38.96
Sumatera	Sumatera Utara	Kab. Labuhanbatu Utara	45.10	45.33	41.61	41.59
Sumatera	Sumatera Utara	Kab. Mandailing Natal	42.97	42.68	40.13	40.18
Sumatera	Sumatera Utara	Kab. Samosir	89.40	89.48	89.46	89.53
Sumatera	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Selatan	54.28	49.26	46.05	46.05
Sumatera	Sumatera Utara	Kab. Tapanuli Tengah	45.93	45.80	43.29	42.93
Sumatera	Sumatera Utara	Kota Tanjung Balai	85.00	85.00	65.00	71.51
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Bengkayang	46.20	46.56	42.31	42.28
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Kapuas Hulu	90.82	90.42	90.28	89.83
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Kayong Utara	81.71	82.93	77.97	77.68

Pulau	Provinsi	Kota/Kabupaten	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Ketapang	76.46	80.19	76.55	74.87
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Kubu Raya	68.60	69.65	64.80	64.92
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Landak	64.64	64.20	57.56	56.67
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Melawi	46.91	50.43	47.71	50.64
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Mempawah	71.67	71.95	61.67	60.44
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Sambas	58.02	58.32	48.18	48.79
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Sanggau	74.34	74.29	71.71	72.39
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Sekadau	52.91	52.91	50.88	50.78
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kab. Sintang	57.23	57.22	54.96	55.24
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kota Pontianak	49.97	50.83	38.65	25.59
Kalimantan	Kalimantan Barat	Kota Singkawang	53.41	57.91	46.97	41.47
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kab. Balangan	47.90	51.02	40.81	40.82
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kab. Banjar	32.06	38.89	57.37	45.85
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kab. Barito Kuala	44.39	49.73	39.44	39.39
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Selatan	54.35	61.12	53.34	54.79
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	48.64	52.71	40.75	40.78
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kab. Hulu Sungai Utara	63.22	66.29	45.93	46.09
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kab. Tabalong	66.31	66.52	76.71	76.67
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kab. Tanah Laut			58.02	85.33
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kab. Tapin	47.00	48.63	43.46	43.59
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru			69.99	67.34
Kalimantan	Kalimantan Selatan	Kota Banjarmasin			58.00	85.01
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Selatan	85.42	86.97	85.38	82.74
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kab. Barito Timur	83.36	84.81	91.40	91.26
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kab. Kapuas	74.27	77.88	76.10	74.72
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kab. Katingan	90.06	91.67	90.85	89.57
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Barat	78.67	82.04	78.77	70.62
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kab. Kotawaringin Timur	67.61	68.93	65.10	65.62
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kab. Lamandau	80.42	80.42	70.88	73.40
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kab. Pulang Pisau	76.40	80.03	75.65	72.36
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kab. Seruyan	76.35	76.97	74.47	66.70
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kab. Sukamara	67.64	74.79	77.32	75.02
Kalimantan	Kalimantan Tengah	Kota Palangkaraya	82.85	85.64	80.44	77.00
Kalimantan	Kalimantan Timur	Kab. Berau	93.83	94.45	94.96	95.83
Kalimantan	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Barat	52.98	53.84	51.71	53.04
Kalimantan	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Kartanegara	70.35	71.16	74.01	73.04
Kalimantan	Kalimantan Timur	Kab. Kutai Timur	85.94	88.46	85.45	85.06
Kalimantan	Kalimantan Timur	Kab. Paser	75.38	76.34	75.62	59.58
Kalimantan	Kalimantan Utara	Kab. Malinau	97.56	97.83	97.83	94.32
Kalimantan	Kalimantan Utara	Kab. Nunukan	90.43	89.93	87.52	87.10
Kalimantan	Kalimantan Utara	Kab. Tana Tidung	73.50	76.60	66.22	66.07
Sulawesi	Sulawesi Barat	Kab. Pasangkayu	52.94	52.99	47.93	47.94
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Kab. Donggala	48.27	48.27	52.45	53.79
Sulawesi	Sulawesi Tengah	Kab. Morowali Utara	54.03	54.03	51.89	52.11
Papua	Papua	Kab. Asmat	97.05	96.85	96.36	
Papua	Papua	Kab. Boven Digoel	92.87	92.88	93.03	

Pulau	Provinsi	Kota/Kabupaten	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
Papua	Papua	Kab. Deiyai	99.18	99.18	99.75	
Papua	Papua	Kab. Dogiyai	70.37	70.41	64.25	
Papua	Papua	Kab. Intan Jaya			99.99	
Papua	Papua	Kab. Jayapura	74.09	95.51	96.49	96.75
Papua	Papua	Kab. Keerom	98.76	98.75	98.76	98.76
Papua	Papua	Kab. Lanny Jaya	89.88	89.88	76.00	
Papua	Papua	Kab. Mamberamo Raya	75.11	96.40	97.69	96.25
Papua	Papua	Kab. Mamberamo Tengah	63.62	91.00	91.90	
Papua	Papua	Kab. Mappi	87.22	87.40	87.60	
Papua	Papua	Kab. Merauke	70.48	74.13	74.57	
Papua	Papua	Kab. Mimika	98.16	98.06	98.11	
Papua	Papua	Kab. Nabire	94.85	94.88	94.59	
Papua	Papua	Kab. Nduga			91.99	
Papua	Papua	Kab. Paniai	75.21	75.09	74.38	
Papua	Papua	Kab. Puncak	94.75	97.71	98.14	
Papua	Papua	Kab. Puncak Jaya	80.46	99.19	97.67	
Papua	Papua	Kab. Sarmi	82.00	98.26	97.93	97.42
Papua	Papua	Kab. Tolikara	66.62	96.48	97.39	
Papua	Papua	Kab. Waropen	97.17	97.30	95.95	93.53
Papua	Papua	Kab. Yahukimo	99.04	99.04	89.84	
Papua	Papua	Kab. Yalimo	70.22	92.54	93.16	
Papua	Papua	Kota Jayapura	79.44	79.35	74.74	73.28
Papua	Papua Barat	Kab. Fak Fak	87.16	86.64	85.43	85.67
Papua	Papua Barat	Kab. Kaimana	97.97	98.59	98.64	98.88
Papua	Papua Barat	Kab. Maybrat	96.80	96.92		
Papua	Papua Barat	Kab. Pegunungan Arfak	67.07	68.17	67.78	67.96
Papua	Papua Barat	Kab. Raja Ampat	99.29	99.47	99.38	
Papua	Papua Barat	Kab. Sorong	98.03	98.53	97.96	
Papua	Papua Barat	Kab. Sorong Selatan	96.41	97.05	96.93	
Papua	Papua Barat	Kab. Tambrauw	63.87	72.17	73.01	
Papua	Papua Barat	Kab. Teluk Bintuni	96.42	97.24	97.12	97.12
Papua	Papua Barat	Kab. Teluk Wondama	96.23	96.39	96.25	96.66
Papua	Papua Barat Daya	Kab. Maybrat				99.99
Papua	Papua Barat Daya	Kab. Raja Ampat				99.37
Papua	Papua Barat Daya	Kab. Sorong				98.25
Papua	Papua Barat Daya	Kab. Sorong Selatan				97.24
Papua	Papua Barat Daya	Kab. Tambrauw				72.47
Papua	Papua Pegunungan	Kab. Mamberamo Tengah				94.37
Papua	Papua Pegunungan	Kab. Tolikara				98.68
Papua	Papua Pegunungan	Kab. Yahukimo				99.81
Papua	Papua Pegunungan	Kab. Yalimo				91.72
Papua	Papua Selatan	Kab. Asmat				96.00
Papua	Papua Selatan	Kab. Boven Digoel				92.83
Papua	Papua Selatan	Kab. Mappi				88.06
Papua	Papua Selatan	Kab. Merauke				73.77
Papua	Papua Tengah	Kab. Deiyai				99.37

Pulau	Provinsi	Kota/Kabupaten	Tahun			
			2020	2021	2022	2023
Papua	Papua Tengah	Kab. Dogiyai				62.70
Papua	Papua Tengah	Kab. Intan Jaya				100.00
Papua	Papua Tengah	Kab. Mimika				98.02
Papua	Papua Tengah	Kab. Nabire				94.60
Papua	Papua Tengah	Kab. Paniai				72.88
Papua	Papua Tengah	Kab. Puncak				97.38
Papua	Papua Tengah	Kab. Puncak Jaya				95.85

### 3. Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik ekosistem gambutnya skala 1:50.000

Inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut dilakukan dengan pengamatan metode sistematis grid yang tersusun dari transek membujur dan melintang. Pada tahun 2022, Ditjen PPKL sudah melakukan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut pada skala 1:50.000 di 48 KHG di 4 provinsi yaitu Riau, Jambi, Kalimantan Barat, dan Lampung.

Adapun pendanaan kegiatan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut pada tahun 2023 berasal dari APBN dan hibah (IMPLI-IFAD dan GIZ).

Luas Kumulatif Ekosistem Gambut hasil inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut yang dilakukan pada tahun tahun 2020-2023 adalah 9.147.327 Ha pada 243 KHG yang terletak di 14 Provinsi yaitu Aceh, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. Capaian jumlah KHG dan luas Ekosistem Gambut hasil inventarisasi tahun 2020-2023.

**Tabel 12.** Rekapitulasi KHG yang Diinventarisasi Tahun 2020 – 2023

No	Tahun	KHG	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
1	2020	KHG Sungai Barito - Sungai Napu	Barito Selatan, Barito Timur	Kalimantan Tengah	APBN-2020
2	2020	KHG Sungai Kapuas - Sungai Murui	Kapuas	Kalimantan Tengah	APBN-2020
3	2020	KHG Sungai Barito - Sungai Ayuh	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	APBN-2020
4	2020	KHG Sungai Lamandau - Sungai Kumai	Kotawaringin Barat	Kalimantan Tengah	SMPEI IFAD-2020
5	2020	KHG Sungai Lamandau - Sungai Sematu	Kotawaringin Barat, Lamandau	Kalimantan Tengah	SMPEI IFAD-2020
6	2020	KHG Sungai Rungan - Sungai Kahayan	Palangkaraya, Pulangpisau	Kalimantan Tengah	SMPEI IFAD-2020
7	2020	KHG Aek Sebatik - Aek Musi	Banyuasin	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
8	2020	KHG Air Banyuasin - Sungai Musi	Banyuasin	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
9	2020	KHG Delta Talang	Banyuasin	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020

No	Tahun	KHG	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
10	2020	KHG Sungai Alur - Sungai Lintang	Musirawas Utara	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
11	2020	KHG Sungai Musi - Sungai Empasan	Musi Banyuasin, Musirawas	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
12	2020	KHG Sungai Musi - Sungai Saleh	Banyuasin	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
13	2020	KHG Sungai Saleh - Sungai Batanghari	Banyuasin	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
14	2020	KHG Sungai Tandatuan - Sungai Beberi	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	SMPEI IFAD-2020
15	2020	KHG Batang Merangin - Batang Tembesi	Merangin, Sarolangun	Jambi	SMPEI IFAD-2020
16	2020	KHG Sungai Batanghari - Sungai Mandahara	Kota Jambi, Muarojambi	Jambi	SMPEI IFAD-2020
17	2020	KHG Sungai Mesao - Aek Rawas	Sarolangun	Jambi	SMPEI IFAD-2020
18	2020	KHG Sungai Baung - Sungai Betara	Tanjung Jabung Barat	Jambi	SMPEI IFAD-2020
19	2020	KHG Sungai Betara - Sungai Mendahara	Muarojambi Tanjabbar, Tanjabtim	Jambi	SMPEI IFAD-2020
20	2020	KHG Sungai Batanghari - Sungai Kampeh	Muarojambi	Jambi	SMPEI IFAD-2020
21	2020	KHG Sungai Batangkalis - Sungai Maday	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2020
22	2020	KHG Sungai Embalun - Sungai Palin	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2020
23	2020	KHG Sungai Embau - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2020
24	2020	KHG Sungai Kapuas - Sungai Embau	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2020
25	2020	KHG Sungai Kapuas - Sungai Maday	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2020
26	2020	KHG Sungai Mendalam - Sungai Sampus	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2020
27	2020	KHG Air Banyuasin – Air Lalang	Banyuasin	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
28	2020	KHG Sungai Air Hitam Laut – Sungai Buntu Kecil	Banyuasin, Muba, MuaroJambi, Tj Jabung Timur	Sumatera Selatan - Jambi	APBN-PEN-2020
29	2020	KHG Sungai Beberi – Sungai Way Mesuji	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
30	2020	KHG Sungai Burnai – Sungai Sibumbang,	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
31	2020	KHG Sungai Burung – Sungai Way Mesuji	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
32	2020	KHG Sungai Kalumpang	Musirawas Utara	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
33	2020	KHG Sungai Medak – Sungai Lalan	Musibanyuasin	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
34	2020	KHG Sungai Musi – Sungai Aek Lematang	Muara Enim, PALI	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
35	2020	KHG Sungai Musi – Sungai Blida	Ogan Ilir, Musi Banyuasin, dan Banyuasin	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
36	2020	KHG Sungai Musi – Sungai Penu	Musi Banyuasin, PALI	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
37	2020	KHG Sungai Musi – Sungai Rawas	Musi Banyuasin, Musirawas, dan Musirawas Utara	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
38	2020	KHG Sungai Penu – Sungai Abah	Musi Banyuasin, PALI	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
39	2020	KHG Sungai Rumpit – Sungai Rawas	Musirawas Utara, Musi Rawas	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
40	2020	KHG Sungai Sembilang – Sungai Lalan	Banyuasin, Musibanyuasin	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
41	2020	KHG Sungai Sibumbang – Sungai Talangrimba	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020



No	Tahun	KHG	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
42	2020	KHG Sungai Talang – Sungai Ulakkedondong	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
43	2020	KHG Sungai Ulakkedondong – Sungai Lumpur	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
44	2020	KHG Sungai Aleki Eli – Sungai Aleki Mafe	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
45	2020	KHG Sungai Aleki Male – Sungai Ifuleki Bian	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
46	2020	KHG Sungai Alekikos Bakian – Sungai Ifuleki Bian	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
47	2020	KHG Sungai Alekikosi Soap – Sungai Alekikosi Seghab	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
48	2020	KHG Sungai Aliku Alo – Sungai Aliku Mauwk Ere	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
49	2020	KHG Sungai Bob Buraka – Sungai Aleki Buraka	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
50	2020	KHG Sungai Bobburaka – Sungai Aliku Anaw	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
51	2020	KHG Sungai Ifuleki Bian – Sungai Lekiage Sentuf	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
52	2020	KHG Sungai Ifuleki Berapto – Sungai Ifuleki Obat	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
53	2020	KHG Sungai Ifuleki Bian – Sungai Dalik	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
54	2020	KHG Sungai Ifuleki Kumbe – Sungai Lekiage Ser	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
55	2020	KHG Sungai Ifuleki Kumbe – Sungai Lekiage	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
56	2020	KHG Sungai Ifuleki Obathrow – Sungai Ifuleki Berapto	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
57	2020	KHG Sungai Ifuleki Onam – Sungai Fly	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
58	2020	KHG Sungai Ifuleki Onam – Sungai Lekiage Wagini	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
59	2020	KHG Sungai Kumbe – Sungai Bian	Merauke	Papua	APBN-PEN-2020
60	2020	KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Udi Lebah	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
61	2020	KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Alekikosi Kauh	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
62	2020	KHG Sungai Buru Miyaman - Sungai Buru Mappi	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
63	2020	KHG Sungai Udi Edera - Sungai Samaleki Digul	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
64	2020	KHG Sungai Wade Passue - Sungai Jo Dairam	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
65	2020	KHG Sungai Alekikos Kauh - Sungai Ifuleki Mati	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
66	2020	KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Aleki Seme, Merauke	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
67	2020	KHG Sungai Alekikosi Digoel - Sungai Alekikosi Bagon	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
68	2020	KHG Sungai Alekikosi Kaswari - Sungai Alekikosi Digoel	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
69	2020	KHG Sungai Alekikosi Sia - Sungai Alekikosi Digoel	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
70	2020	KHG Sungai Alekikosi Yang - Sungai Alekikosi Digoel	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
71	2020	KHG Sungai Alekokosi Kaswari - Sungai Alekikosi Dawe	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
72	2020	KHG Sungai Buru Bayeni - Sungai Buru Mappi	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020

No	Tahun	KHG	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
73	2020	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Mangguno	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
74	2020	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Udi Afu	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
75	2020	KHG Sungai Buru Mappi II	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
76	2020	KHG Sungai Ivo - Sungai Fly, Merauke	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
77	2020	KHG Sungai Kanggu - Sungai Fly	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
78	2020	KHG Sungai Mappi - Sungai Edera	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
79	2020	KHG Sungai Muyu	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
80	2020	KHG Sungai Udi Aifo - Sungai Buru Mappi	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
81	2020	KHG Sungai Wade Kowo - Sungai Buru Bayeni	Boven Digoel	Papua	APBN-PEN-2020
82	2020	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Buru Obaa	Mappi, Asmat	Papua	APBN-PEN-2020
83	2020	KHG Sungai Wade Nanu - Sungai Wade Assue	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
84	2020	KHG Aek Garoga - Batang Toru	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
85	2020	KHG Aek Maraitgadang - Batang Maraitgadang	Mandailing Natal	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
86	2020	KHG Aek Maros - Aek Pandan	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
87	2020	KHG Aek Panggainsira - Aek Arong	Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
88	2020	KHG Aek Silang - Lae Renun	Samosir	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
89	2020	KHG Aek Siriam - Batang Singkuang	Mandailing Natal	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
90	2020	KHG Aek Sordang - Aek Kalang	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
91	2020	KHG Aek Sulpi - Aek Sibundong	Humbang Hasundutan	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
92	2020	KHG Batang Batahan - Batang Tamak	Mandailing Natal	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
93	2020	KHG Batang Singkuang - Nainjan Nu Godang	Mandailing Natal	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
94	2020	KHG Lae Rapus - Aek Pardomuan	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
95	2020	KHG Lae Sibungkuang,	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
96	2020	KHG Lae Sibungkuang - Aek Tarutungol	Tapanuli Tengah	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
97	2020	KHG Sungai Asahan - Sungai Leidong	Asahan, Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
98	2020	KHG Sungai Barumon - Sungai Kubu	Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
99	2020	KHG Sungai Barumon - Sungai Mabar	Labuhanbatu Selatan	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
100	2020	KHG Sungai Kuo - Sungai Kualuh Bilah	Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
101	2020	KHG Sungai Leidong - Sungai Kuala	Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
102	2020	KHG Sungai Marbau - Sungai Kualuh Bilah	Labuhanbatu, Labuhanbatu Utara	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
103	2020	KHG Sungai Nata - Sungai Sinunukan	Mandailing Natal	Sumatera Utara	APBN-PEN-2020
104	2020	KHG Sungai Mentaya - Sungai Seranau Kiri	Kotawaringin Timur	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
105	2020	KHG Sungai Pukun - Sungai Kelua Besar	Seruyan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020

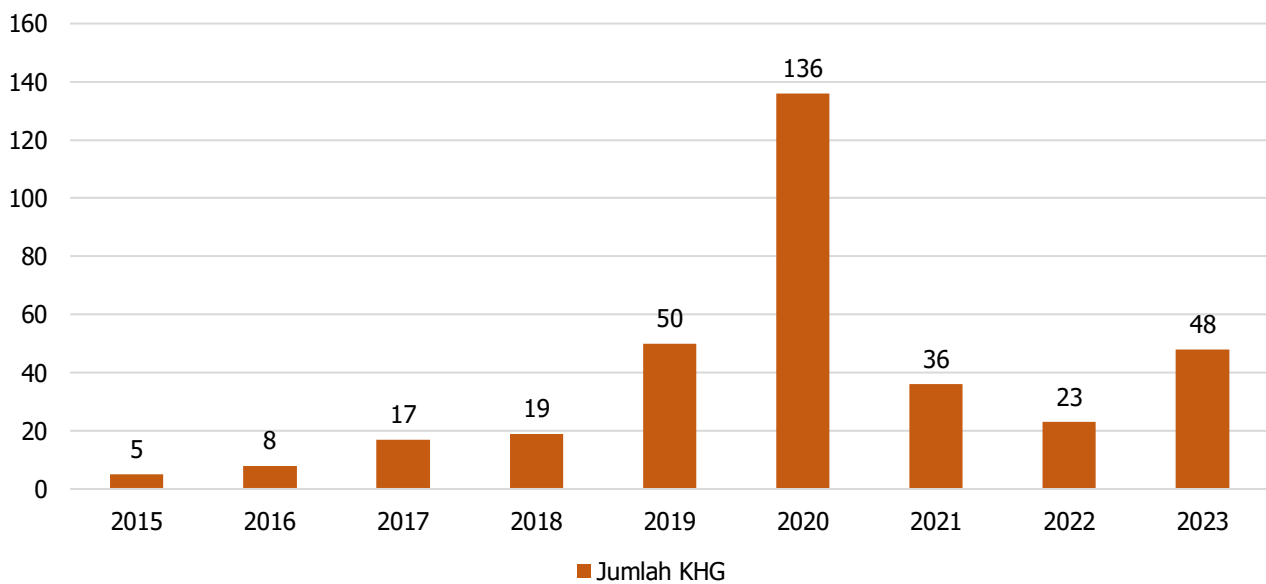
No	Tahun	KHG	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
106	2020	KHG Sungai Pukun - Sungai Seruyan	Seruyan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
107	2020	KHG Sungai Seruyan - Sungai Kelua Besar	Seruyan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
108	2020	KHG Sungai Kapuas - Sungai Barito	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
109	2020	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	Kapuas	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
110	2020	KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 2	Barito Selatan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
111	2020	KHG Sungai Katingan - Sungai Mentaya	Katingan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
112	2020	KHG Sungai Pukun - Sungai Mentaya	Seruyan	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
113	2020	KHG Sungai Kuis - Sungai Bapai	Asmat	Papua	APBN-PEN-2020
114	2020	KHG Sungai Buru Bagaram	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
115	2020	KHG Sungai Buru Mappi - Sungai Siakha Homo	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
116	2020	KHG Sungai Buru Mappi I	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
117	2020	KHG Sungai Buru Obaa - Sungai Buru Mappi	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
118	2020	KHG Sungai Jaman Kawarga - Sungai Samaleki Digul	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
119	2020	KHG Sungai Jo Dairam	Asmat, Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
120	2020	KHG Sungai Jo Vriendschaps - Sungai Jo Siret	Asmat, Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
121	2020	KHG Sungai Ju Siret- Sungai Wade Assue	Asmat, Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
122	2020	KHG Sungai Wade Passue	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
123	2020	KHG Sungai Keeme - Sungai Bayeni	Mappi	Papua	APBN-PEN-2020
124	2020	KHG Sungai Bangkudulis	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
125	2020	KHG Sungai Bangkudulis - Sungai Umbus	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
126	2020	KHG Sungai Belanyu - Sungai Balai	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
127	2020	KHG Sungai Belanyu - Sungai Barang	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
128	2020	KHG Sungai Mentarang - Sungai Belayu	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
129	2020	KHG Sungai Mentarang - Sungai Siduyun	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
130	2020	KHG Sungai Mentarang- Sungai Sembakung	Malinau, Nunukan, Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
131	2020	KHG Sungai Sebuku	Nunukan	Kalimantan Utara	GIZ-2020
132	2020	KHG Sungai Sebuku - Sungai Sembakung	Nunukan	Kalimantan Utara	GIZ-2020
133	2020	KHG Sungai Sedaung - Sungai Itai	Nunukan	Kalimantan Utara	GIZ-2020
134	2020	KHG Sungai Seputuk - Sungai Rian	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
135	2020	KHG Sungai Sumbal - Sungai Samadik	Nunukan	Kalimantan Utara	GIZ-2020
136	2020	KHG Sungai Terusan Teladan	Tanatidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
137	2021	KHG Sungai Ambawang - Sungai Landak	Kuburaya, Landak, Sanggau	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
138	2021	KHG Sungai Kapuas - Sungai Ambawang	Kota Pontianak, Kuburaya, Sanggau	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021

No	Tahun	KHG	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
139	2021	KHG Sungai Kapuas - Sungai Mandor	Kota Pontianak, Mempawah, Kuburaya, Landak	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
140	2021	KHG Sungai Suruk - Sungai Mentebah	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
141	2021	KHG Sungai Mandor - Sungai Temila	Kuburaya, Landak	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
142	2021	KHG Sungai Temila - Sungai Mandor	Landak	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
143	2021	KHG Sungai Punggurbesar - Sungai Ambawang	Kuburaya	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
144	2021	KHG Sungai Punggurbesar - Sungai Kapuas	Kota Pontianak, Kuburaya	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
145	2021	KHG Sungai Terentang - Sungai Kapuas	Kuburaya	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
146	2021	KHG Sungai Mempawah - Sungai Duri	Bengkayang, Mempawah	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
147	2021	KHG Sungai Duri - Sungai Raya	Bengkayang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
148	2021	KHG Sungai Raya - Sungai Pangnilang	Bengkayang, Kota Singkawang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
149	2021	KHG Sungai Selakau	Bengkayang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
150	2021	KHG Sungai Selakau - Sungai Sebangkau	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
151	2021	KHG Sungai Mange - Sungai Dadau	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
152	2021	KHG Sungai Sambas Besar - Sungai Sijang	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
153	2021	KHG Sungai Sijang - Sungai Bantan	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
154	2021	KHG Sungai Sambas Besar - Sungai Kumba	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
155	2021	KHG Sungai Sentinok - Sungai Kumba	Sambas, Bengkayang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
156	2021	KHG Sungai Sambas Kecil - Sungai Sambas Besar	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
157	2021	KHG Sungai Kumba - Sungai Setap	Sambas, Bengkayang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
158	2021	KHG Sungai Teberau - Sungai Sambas Kecil	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
159	2021	KHG Sungai Samabas Kecil - Sungai Teberau	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
160	2021	KHG Sungai Sedawar - Sungai Sambas Besar	Sambas	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
161	2021	KHG Sungai Labai - Sungai Ambawang Besar	Sanggau	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
162	2021	KHG Sungai Labai - Sungai Bantilkecil	Ketapang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
163	2021	KHG Sungai Durian - Sungai Labai	Kuburaya	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
164	2021	KHG Sungai Durian - Sungai Kualan	Kayong Utara, Ketapang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
165	2021	KHG Sungai Selat Maya - Sungai Aping	Kayong Utara	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
166	2021	KHG Sungai Siduk - Sungai Rantaupanjang	Kayong Utara	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
167	2021	KHG Sungai Tolak - Sungai Siduk	Ketapang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
168	2021	KHG Sungai Pawan - Sungai Tolak	Ketapang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
169	2021	KHG Sungai Pawan - Sungai Kepulu	Ketapang	Kalimantan Barat	SMPEI IFAD-2021
170	2021	KHG Sungai Pasang Kayu - Sungai Bambalamotu	Mamuju Utara, Donggala	Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah	SMPEI IFAD-2021

No	Tahun	KHG	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
171	2021	KHG Sungai Salo Lariang - Sungai Pasang Kayu	Mamuju Utara, Donggala	Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah	SMPEI IFAD-2021
172	2021	KHG Sungai Laa - Sungai Petasia	Morowali Utara	Sulawesi Tengah	SMPEI IFAD-2021
173	2022	KHG Pulau Tanbuayabuaya	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
174	2022	KHG Pulau Tanjungbuaya-buaya	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
175	2022	KHG Sei Batu Putih	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
176	2022	KHG Sungai Belayan - Sungai Kelinjau	Kutai Timur, Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
177	2022	KHG Sungai Belayan - Sungai Melintang	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
178	2022	KHG Sungai Jempang - Sungai Kedangpahu	Kutai Barat	Kalimantan Timur	GIZ-2022
179	2022	KHG Sungai Kariabu	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
180	2022	KHG Sungai Kedupan - Sungai Layah	Kutai Barat, Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
181	2022	KHG Sungai Lenggo	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
182	2022	KHG Sungai Mahakam - Sungai Kedangpahu	Kutai Barat	Kalimantan Timur	GIZ-2022
183	2022	KHG Sungai Mahakam - Sungai Sabintulung	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
184	2022	KHG Sungai Melintang - Sungai Layah	Kutai Barat, Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
185	2022	KHG Sungai Pasir - Sungai Kuaro	Paser	Kalimantan Timur	GIZ-2022
186	2022	KHG Sungai Tanbuayabuaya - Sungai Domaring	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
187	2022	KHG Sungai Leko - Sungai Minas	Siak	Riau	SMPEI-IFAD 2022
188	2022	KHG Sungai Mandiangin - Sungai Siak	Siak	Riau	SMPEI-IFAD 2022
189	2022	KHG Sungai Nilo - Sungai Napuh	Pelalawan	Riau	SMPEI-IFAD 2022
190	2022	KHG Sungai Rokan - Sungai Kubu	Rokan Hilir	Riau	SMPEI-IFAD 2022
191	2022	KHG Sungai Siak Kecil - Sungai Siak	Bengkalis, Siak	Riau	SMPEI-IFAD 2022
192	2022	KHG Sungai Mading - Sungai Jelai	Ketapang	Kalimantan Barat	APBN 2022
193	2022	KHG Sungai Belitung - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	APBN 2022
194	2022	KHG Sungai Kapuas - Sungai Biangantuk (Kabupaten Sintang)	Sintang	Kalimantan Barat	APBN 2022
195	2022	KHG Sungai Keramat - Sungai Jelai (Kabupaten Ketapang)	Ketapang	Kalimantan Barat	APBN 2022
196	2023	KHG Batang Rokan Kiri - Batang Sosa	Kab. Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak	Riau	APBN 2023
197	2023	KHG Sungai Gongan - Sungai Nilo	Kab. Pelalawan	Riau	APBN 2023
198	2023	KHG Sungai Indragiri - Sungai Cenaku	Kab. Indragiri Hulu	Riau	APBN 2023
199	2023	KHG Sungai Rokan Kiri - Sungai Mandau	Kab. Bengkalis, Kampar, Rokan Hulu, Siak	Riau	GEF6-IMPLI 2022
200	2023	KHG Sungai Bangko - Sungai Rokan Kanan	Kab. Rokan Hilir	Riau	GEF6-IMPLI 2022
201	2023	KHG Batang Tembei - Sungai Merak	Kab. Merangin, Sarolangun	Jambi	GEF6-IMPLI 2022
202	2023	KHG Sungai Pengabuan - Sungai Baung	Kab. Tanjung Jabung Barat	Jambi	GEF6-IMPLI 2022
203	2023	KHG Sungai Mesuji - Sungai Kebumangah	Kab. Mesuji	Lampung	GEF6-IMPLI 2022

No	Tahun	KHG	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
204	2023	KHG Sungai Mesuji - Sungai Tulangbawang	Kab. Mesuji	Lampung	GEF6-IMPLI 2022
205	2023	KHG Way Seputih	Kab. Tulangbawang	Lampung	GEF6-IMPLI 2022
206	2023	KHG Way Terusan	Lampung Tengah	Lampung	GEF6-IMPLI 2022
207	2023	KHG Way Wako - Way Kambas	Lampung Timur	Lampung	GEF6-IMPLI 2022
208	2023	KHG Sungai Jenu - Sungai Labai	Kab. Kuburaya	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
209	2023	KHG Sungai Kapuas	Kab. Kuburaya	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
210	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Dawak	Kab. Kuburaya	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
211	2023	KHG Sungai Ketungau - Sungai Berau	Kab. Kapuas Hulu, Sintang	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
212	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Jentu	Kab. Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
213	2023	KHG Sungai Yebour - Sungai Landak	Kab. Kuburaya, Landak, Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
214	2023	KHG Sungai Nahaya - Sungai Landak	Kab. Landak	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
215	2023	KHG Sungai Sabuak - Sungai Landak	Kab. Landak	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
216	2023	KHG Sungai Sambih	Kab. Landak	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
217	2023	KHG Sungai Sengah - Sungai Landak	Kab. Landak	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
218	2023	KHG Sungai Inggis - Sungai Kapuas	Kab. Sanggau, Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
219	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Menukung	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
220	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Campedik	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
221	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Dekan Besar	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
222	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Muna	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
223	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Segelam	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
224	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Tayan	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
225	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Tembaga	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
226	2023	KHG Sungai Mias - Sungai Perogang	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
227	2023	KHG Sungai Tayan	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
228	2023	KHG Sungai Tayan - Sungai Muna	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
229	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Rusan	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
230	2023	KHG Sungai Rambai - Sungai Meliau	Kab. Sanggau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
231	2023	KHG Sungai Akar	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
232	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Ayak	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
233	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Kubu	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
234	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Sebidau	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
235	2023	KHG Sungai Sekadau - Sungai Kenawan	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
236	2023	KHG Sungai Sekadau - Sungai Menterap	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
237	2023	KHG Sungai Menterap - Sungai Kerabat	Kab. Sekadau	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022

No	Tahun	KHG	Kabupaten/Kota	Provinsi	Sumber Pembiayaan
238	2023	KHG Sungai Melawi - Sungai Batunanta	Kab. Melawi, Sintang	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
239	2023	KHG Sungai Melawi - Sungai Belimbing	Kab. Melawi	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
240	2023	KHG Sungai Melawi - Sungai Takelak	Kab. Melawi	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
241	2023	KHG Sungai Jerora - Sungai Majau	Kab. Sintang	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
242	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Jelawat Besar	Kab. Kapuas Hulu, Sintang	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022
243	2023	KHG Sungai Kapuas - Sungai Beran	Kab. Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	GEF6-IMPLI 2022



**Gambar 3.** Jumlah Inventarisasi KHG Tiap Tahunnya Dari Tahun 2015 Hingga Tahun 2023

#### 4. Jumlah KHG yang ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Skala 1:50.000

Penetapan fungsi Ekosistem Gambut sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016, ditetapkan bahwa fungsi Ekosistem Gambut terdiri dari fungsi lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya Ekosistem Gambut. Kedua fungsi tersebut ditetapkan dengan memperhatikan ketebalan gambut tiga meter atau lebih, plasma nutfah spesifik dan/atau endemik, spesies yang dilindungi sesuai dengan peraturan perundangan, serta Ekosistem Gambut yang berada di kawasan lindung sebagaimana ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi.

Penetapan fungsi Ekosistem Gambut ini merupakan acuan dalam pemanfaatan Ekosistem Gambut. Pemanfaatan Ekosistem Gambut di fungsi lindung terbatas hanya untuk penelitian, pendidikan serta jasa lingkungan sementara di fungsi budi daya pemanfaatan Ekosistem Gambut dapat dilakukan lebih bervariasi lagi sesuai dengan dokumen rencana perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut. Pada tahun 2023, KLHK sedang melakukan pengusulan penetapan fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 terhadap 30 (tiga puluh) KHG.

**Tabel 13.** Data Usulan Penetapan Peta Karakteristik Ekosistem Gambut Skala 1:50.000 Tahun 2023

Nama KHG	Kabupaten	Provinsi	Tahun Inventarisasi
KHG Sungai Mading - Sungai Jelai	Ketapang	Kalimantan Barat	APBN 2022
KHG Sungai Belitung - Sungai Kapuas	Kapuas Hulu	Kalimantan Barat	APBN 2022
KHG Sungai Kapuas - Sungai Biangantuk	Sintang	Kalimantan Barat	APBN 2022
KHG Pulau Tanbuayabuaya	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Pulau Tanjungbuaya-buaya	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sei Batu Putih	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sungai Belayan - Sungai Kelinjau	Kutai Timur, Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sungai Belayan - Sungai Melintang	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sungai Jempang - Sungai Kedangpahu	Kutai Barat	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sungai Kariabu	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sungai Kedupan - Sungai Layah	Kutai Barat, Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sungai Lenggo	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sungai Mahakam - Sungai Kedangpahu	Kutai Barat	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sungai Mahakam - Sungai Sabintulung	Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sungai Melintang - Sungai Layah	Kutai Barat, Kutai Kartanegara	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sungai Pasir - Sungai Kuaru	Paser	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sungai Tanbuayabuaya - Sungai Domaring	Berau	Kalimantan Timur	GIZ-2022
KHG Sungai Belanyu - Sungai Barang	Tanah Tidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
KHG Sungai Mentarang - Sungai Belayu	Tanah Tidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
KHG Sungai Mentarang - Sungai Siduyun	Tanah Tidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
KHG Sungai Mentarang - Sungai Sembakung	Malinau, Nunukan, Tanah Tidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
KHG Sungai Sebuku	Nunukan	Kalimantan Utara	GIZ-2020
KHG Sungai Sebuku - Sungai Sembakung	Nunukan	Kalimantan Utara	GIZ-2020
KHG Sungai Sepuduk - Sungai Rian	Tanah Tidung	Kalimantan Utara	GIZ-2020
KHG Sungai Sumbal - Sungai Samadik	Nunukan	Kalimantan Utara	GIZ-2020
KHG Sungai Ulakkedondong - Sungai Lumpur	Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	APBN-PEN-2020
KHG Sungai Sugihan - Sungai Lumpur	Banyuasin, Ogan Komering Ilir	Sumatera Selatan	BRG 2017
KHG Sungai Mangkatip - Sungai Barito 1	Kapuas	Kalimantan Tengah	APBN-PEN-2020
KHG Sungai Gasip - Sungai Siak	Siak	Riau	APBN 2019
KHG Sungai Mendawai - Sungai Gasip	Siak	Riau	APBN 2019



## 5. Jumlah Provinsi & Kabupaten/Kota yang Telah Dilakukan Peningkatan Kapasitas Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut mengamanatkan Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota untuk menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. RPPEG menjadi dasar serta memperhatikan perencanaan pembangunan lainnya, seperti RPJP/RPJM, rencana tata ruang wilayah, rencana kehutanan, serta rencana strategis dan sektoral lainnya.

KLHK sudah menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.60/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan, Penetapan dan Perubahan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, serta Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 246/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut Nasional. Kebijakan tersebut menjadi acuan bagi pemerintah Setelah pada tahun 2023 Ditjen PPKL telah melakukan sosialisasi dan/atau fasilitasi penyusunan RPPEG di 12 Provinsi & Kabupaten/Kota. Telah dilakukan pula pebahasan telaahan internal pada 6 Provinsi & Kabupaten/Kota.

**Tabel 14.** Jumlah Kabupaten/Kota yang telah Dilakukan Sosialisasi RPPEG di Tahun 2023

PROVINSI	No	PEMBAHASAN DRAF DOKUMEN RPPEG	KETERANGAN
Sumatera Utara	1	Provinsi Sumatera Utara	Pembahasan bersama OPD
Aceh	2	Pemerintah Aceh	Pembahasan bersama OPD
Riau	3	Kabupaten Indragiri Hulu	Pembahasan bersama OPD
Sumatera Selatan	4	Provinsi Sumatera Selatan	Pembahasan bersama OPD
Kalimantan Barat	5	Provinsi Kalimantan Barat	Telaahan di Internal Dit PKEG
	6	Kabupaten Kuburaya	Telaahan di Internal Dit PKEG
Kalimantan Tengah	7	Kabupaten Katingan	Pembahasan bersama OPD
	8	Kota Palangka Raya	Pembahasan bersama OPD
	9	Kabupaten Pulang Pisau	Pembahasan bersama OPD
Kalimantan Timur	10	Provinsi Kalimantan Timur	Pembahasan bersama OPD
	11	Kabupaten Berau	Telaahan di Internal Dit PKEG
	12	Kabupaten Kutai Barat	Telaahan di Internal Dit PKEG
	13	Kabupaten Kutai Timur	Pembahasan bersama OPD
	14	Kabupaten Kutai Kartanegara	Telaahan di Internal Dit PKEG
Kalimantan Utara	15	Provinsi Kalimantan Utara	Pembahasan bersama OPD
	16	Kabupaten Nunukan	Pembahasan bersama OPD
	17	Kabupaten Tana Tidung	Pembahasan bersama OPD
Papua Selatan	18	Provinsi Papua Selatan	Pembahasan bersama OPD

## 6. Jumlah Industri yang Dilakukan Penilaian Kinerja dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

Pemulihan lahan gambut selain dilaksanakan di lahan masyarakat juga dilakukan di lahan yang berizin dengan menggunakan intervensi peraturan. Adanya kontrol dari pemerintah terhadap pemantauan kualitas gambut, mengacu pada PP Nomor 71 Tahun 2014 jo PP Nomor 57 Tahun 2016. Pemantauan lahan gambut dilakukan di lahan konsesi Perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan/Hutan Tanaman Industri (PBPH/HTI) dan Perkebunan.

Perusahaan melaksanakan pemulihan Ekosistem Gambut sesuai dengan arahan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan – KLHK yang mengatur kewajiban perusahaan antara lain melaksanakan pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) baik pengukuran secara manual ataupun otomatis dengan menggunakan alat datalogger, memantau curah hujan, rehabilitasi vegetasi dan kewajiban pelaporan perusahaan setiap bulannya kepada KLHK.

**Tabel 15.** Rincian Pemulihan Ekosistem Gambut di Areal Konsesi Per Bulan Desember 2023

	<b>PBPH</b>	<b>Perkebunan</b>	<b>Total</b>
Jumlah Perusahaan	73	259	332
Luas Pemulihan Ekosistem Gambut	2.315.758,78 ha	1.619.838,40 ha	3.935.587,18 ha
Jumlah TP TMAT	5.086 unit	5.752 unit	10.838 unit
Jumlah Stasiun Curah Hujan	269 unit	687 unit	956 unit
Jumlah Sekat kanal Eksisting	8.081 unit	22.323 unit	30.404 unit
Luas Rehabilitasi Vegetasi	184.741,65 ha	- ha	184.741,65 ha
Luas Rehabilitasi Vegetasi Areal Bekas Terbakar	27.230,35 Ha	9.824,01 ha	37.054,36 ha

## 7. Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER)

Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PROPER merupakan evaluasi kinerja terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini merupakan bentuk

pembinaan dan pengawasan pemerintah terhadap kinerja penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Penilaian PROPER untuk Ekosistem Gambut dilakukan pada kegiatan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perkebunan yang berada dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dengan kriteria penilaian meliputi :

- a. Pengendalian Pencemaran Air;
- b. Pengendalian Pencemaran Udara;
- c. Pengelolaan Limbah B3; dan
- d. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut.

Penilaian pada aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan pengelolaan Limbah B3 dilakukan sesuai dengan kriteria dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk Aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut menggunakan kriteria penilaian pada Keputusan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Nomor: SK 17/PPKL/PKEG/PKL.0/1/2023. Kriteria penilaian pada Aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut terdiri atas :

- a. Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut;
- b. Legalitas Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut;
- c. Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut;
- d. Kegiatan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut; dan
- e. Pencegahan Dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.



**Gambar 80.** Tahapan Pelaksanaan PROPER secara umum

Tahapan Pelaksanaan PROPER meliputi perencanaan, penilaian, dan pemeringkatan. Kegiatan perencanaan berupa penyusunan kriteria penilaian, penyusunan daftar peserta PROPER, pengembangan sistem pelaporan elektronik aspek pengendalian kerusakan ekosistem gambut (Pengembangan Simatag-04), integrasi SImatag-04 kedalam sistem pelaporan elektronik bidang pengelolaan lingkungan hidup (simplen.menlhk.go.id), peningkatan kapasitas kepada tim penilai, Sosialisasi kepada perusahaan peserta PROPER. Kegiatan Penilaian berupa evaluasi dokumen penilaian, verifikasi lapangan, pengolahan data, penyusunan rapor sementara, penyampaian hasil evaluasi sementara, evaluasi dokumen sanggahan, penyusunan rapor final. Pemeringkatan PROPER dilakukan oleh seluruh tim pelaksana PROPER bersama dengan Sekretariat PROPER dengan melihat kinerja pada seluruh aspek penilaian.



**Gambar 5.** Sosialisasi Kriteria penilaian PROPER oleh Dirjen PPKL kepada Perkebunan dan PBPH

Pelaksanaan PROPER pada periode Juli 2022 s/d Juni 2023 dilakukan pada 330 (Tiga Ratus Tiga Puluh) perusahaan dengan rincian pada sektor Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) sebanyak 68 perusahaan dan sektor perkebunan sebanyak 262 perusahaan. Hasil akhir penilaian sebagai berikut :

- a. sebanyak 20 perusahaan peringkatnya ditangguhkan;
- b. sebanyak 16 perusahaan mendapat peringkat MERAH (Tidak Taat) karena sama sekali tidak melaporkan kinerja pengelolaan lingkungan;
- c. sebanyak 142 perusahaan (48,8 %) mendapat peringkat MERAH (Tidak Taat) karena belum memenuhi aspek ketaatan, jumlah tersebut terdiri atas 14 perusahaan PBPH dan 129 perusahaan perkebunan;
- d. sebanyak 150 perusahaan (51,2 %) mendapat peringkat BIRU (Taata), jumlah tersebut terdiri atas 50 perusahaan PBPH dan 100 perusahaan perkebunan;



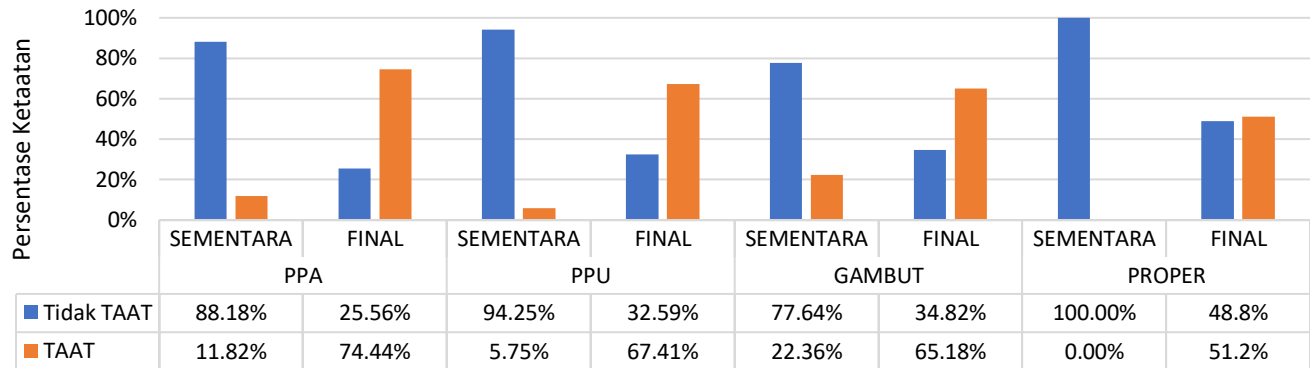
**Gambar 6.** Sistem Pelaporan Elektronik Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Simpel.Menlhk.Go.Id) Yang Telah Mengintegrasikan Aspek Pelaporan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut



**Gambar 7.** Dokumentasi verifikasi lapangan penilaian PROPER

Persentase peringkat sementara dibandingkan dengan peringkat akhir sangat signifikan, pada saat peringkat sementara disampaikan Tidak ada perusahaan yang mendapat peringkat biru, namun dengan adanya tahapan sanggahan perusahaan sangat antusias untuk melengkapi data yang masih kurang untuk dilaporkan. Rincian ketaatan setiap aspek penilaian pada hasil akhir adalah sebagai berikut :

- a. Pengendalian Pencemaran Air : TAAT 74,44 %, TIDAK TAAT 25,56 %;
- b. Pengendalian Pencemaran Udara : TAAT 67,71 %, TIDAK TAAT 32,59 %;
- c. Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut:TAAT 65,18%,TIDAK TAAT 34,82%;

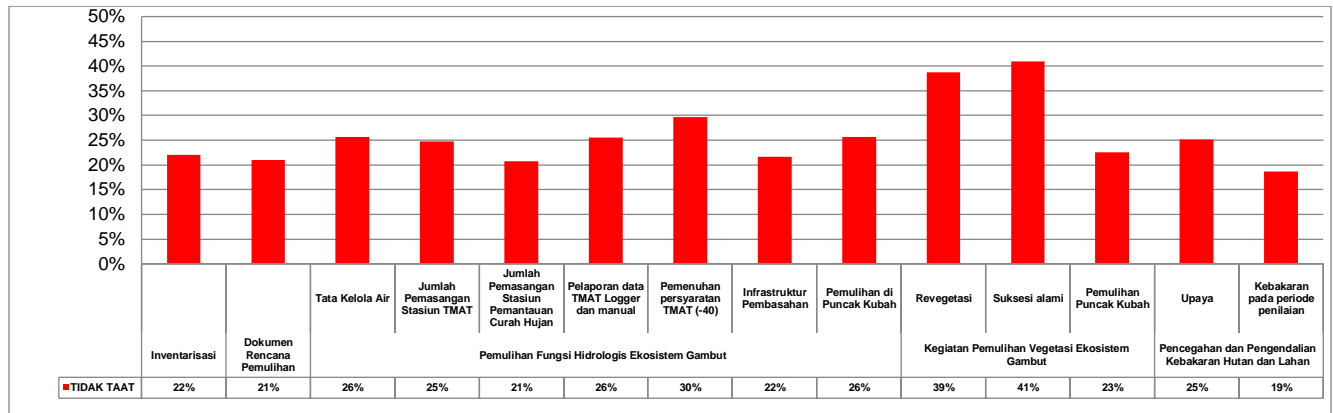


**Gambar 84.** Grafik Persentase Ketaatan Setiap Aspek Penilaian Pada Saat Rapor Sementara dan Rapor Final (Akhir)

Hasil penilaian aspek pengendalian kerusakan ekosistem gambut ketidaktaatan tertinggi ada pada aspek Kegiatan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut yang mencapai 41 % sedangkan ketaatan tertinggi pada kriteria dokumen rencana pemulihan, rincian persentase tersebut disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 60.** Nilai Ketaatan pada Kriteria Penilaian Aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

No	Ketaatan Per Kriteria	TIDAK TAAT	TAAT
1.	<b>Inventarisasi</b>	22%	78%
2.	<b>Dokumen Rencana Pemulihan</b>	21%	79%
3.	<b>Pemulihan Fungsi Hidrologis Ekosistem Gambut</b>	30%	70%
	a. Tata Kelola Air	26%	74%
	b. Jumlah Pemasangan Stasiun TMAT	25%	75%
	c. Jumlah Pemasangan Stasiun Pemantauan Curah Hujan	21%	79%
	d. Pelaporan data TMAT Logger dan manual	26%	74%
	e. Pemenuhan persyaratan TMAT (-40)	30%	70%
	f. Infrastruktur Pembasahan	22%	78%
	g. Pemulihan di Puncak Kubah	26%	74%
4.	<b>Kegiatan Pemulihan Vegetasi Ekosistem Gambut</b>	41%	59%
	a. Revegetasi	39%	61%
	b. Suksesi alami	41%	59%
	c. Pemulihan Puncak Kubah	23%	77%
5.	<b>Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</b>	25%	75%
	a. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan	25%	75%
	b. Kebakaran pada periode penilaian	19%	81%



**Gambar 9.** Grafik Nilai Ketaatan Pada Kriteria Penilaian Aspek Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut

## 8. Jumlah Desa yang Difasilitasi Menjaga Ekosistem Gambut

Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) dilakukan di 9 (sembilan) provinsi yaitu Lampung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua.

Pelaksanaan program tersebut juga melibatkan perguruan tinggi yang berada dekat dengan lokasi desa mandiri peduli gambut yaitu:

1. Fakultas Pertanian, Universitas Lampung;
2. LPPM Universitas Negeri Medan;
3. Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya;
4. Fakultas Kehutanan, Universitas Tanjungpura;
5. Fakultas Pertanian, Universitas Palangkaraya;
6. Fakultas Kehutanan, Universitas Lambung Mangkurat;
7. Unit Layanan Strategis (ULS) Pusat Kajian Pengembangan dan Penataan Ruang PK2R, Universitas Mulawarman;
8. Fakultas Pertanian dan Kehutanan, Universitas Sulawesi Barat; dan
9. Fakultas Pertanian, Universitas Musamus Merauke.

Untuk tahun 2023, capaian pembangunan desa mandiri peduli gambut adalah 60 desa yang terdiri dari 6 desa di Provinsi Sumatera Selatan, 16 desa di Provinsi Sumatera Utara, 8 desa di Provinsi Lampung, 9 desa di Provinsi Kalimantan Barat, 7 desa di Provinsi Kalimantan Selatan, 3 desa di Provinsi Kalimantan Timur, 3 desa di Provinsi Kalimantan Tengah, 5 desa di Sulawesi Barat, dan 3 desa di Provinsi Papua

Pelaksanaan program Rencana Kemandirian Masyarakat (RKM) ini disesuaikan dengan karakteristik Ekosistem Gambut di daerah yang menjadi lokasi DMPG. Dengan demikian program yang disusun berdasarkan identifikasi masalah, kebutuhan masyarakat dan kesesuaian dengan fungsi Ekosistem Gambut. Hal ini sebagai salah satu upaya pemberdayaan masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian fungsi Ekosistem Gambut. Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya Program Kemandirian Masyarakat, antara lain:

1. Mengembangkan organisasi kelembagaan di masyarakat yang dapat berperan secara partisipatif untuk mencegah kerusakan Ekosistem Gambut
2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan secara partisipatif masyarakat melalui pendampingan oleh fasilitator.

Sebaran lokasi Program Kemandirian Masyarakat tahun 2020 - 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 17.** Program Kemandirian Masyarakat Tahun 2020-2023

NO	TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
1	2020	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Dusun Hilir	Mahajandau
2	2020	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Dusun Hilir	Sungai Jaya
3	2020	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Jenamas	Tabatan
4	2020	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Jenamas	Tampulang
5	2020	Kalimantan Tengah	Barito Selatan	Karau Kuala	Babai
6	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Kalumpang
7	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Katimpun
8	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Katunjung
9	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Lahei Mangkutup
10	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Mantangai Hilir
11	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Mantangai Hulu
12	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Mantangai Tengah
13	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Pulau Kaladan
14	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Sei Ahas
15	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Mantangai	Tumbang Muroi
16	2020	Kalimantan Tengah	Kapuas	Selat	Panamas
17	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Garung
18	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Henda
19	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Jabiren
20	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Pilang
21	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Sakakajang
22	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Simpur
23	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Tanjung Taruna
24	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Tumbang Nusa
25	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Buntoi
26	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Gohong
27	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Kalawa
28	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Mantaren I
29	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Hilir	Mintin
30	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Kuala	Bahaur Hilir
31	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Kuala	Bahaur Tengah
32	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Kuala	Cemantan
33	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Kuala	Sei Rungun
34	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Kuala	Tanjung Perawan



NO	TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
35	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Balukon
36	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Bukit Rawi
37	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Pamarunan
38	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Penda Barania
39	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Petuk Liti
40	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Tahawa
41	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Kahayan Tengah	Tanjung Sangalang
42	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Maliku	Kanamit
43	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Maliku	Kanamit Barat
44	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Maliku	Sei Baru Tewu
45	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Mekar Jaya
46	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Paduran Mulya
47	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Paduran Sebangau
48	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Sebangau Jaya
49	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Sebangau Mulya
50	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Sebangau Permai
51	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Sei Bakau
52	2020	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Sebangau Kuala	Sei Hambawang
53	2020	Sumatera Utara	Asahan	Sei Kepayang	Pertahanan
54	2020	Sumatera Utara	Asahan	Sei Kepayang	Sei Paham
55	2020	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Leidong	Air Hitam
56	2020	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Leidong	Kelapa Sebatang
57	2021	Aceh	Aceh Barat	Arongan Lambalek	Keub
58	2021	Aceh	Aceh Barat	Johan Pahlawan	Leuhan
59	2021	Aceh	Aceh Jaya	Sampoiniet	Jeumpheuk
60	2021	Aceh	Aceh Jaya	Teunom	Tanoh Anou
61	2021	Aceh	Nagan Raya	Kuala Pesisir	Kualo Baro
62	2021	Aceh	Nagan Raya	Kuala Pesisir	Padang Payang
63	2021	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Banjang	Pawalutan
64	2021	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Banjang	Pulau Damar
65	2021	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Pabaungan Hulu
66	2021	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas
67	2021	Kalimantan Utara	Nunukan	Sembakung	Atap
68	2021	Kalimantan Utara	Nunukan	Sembakung	Lubakan
69	2021	Kalimantan Utara	Nunukan	Sembakung	Manuk Bungkul
70	2021	Kalimantan Utara	Nunukan	Sembakung	Pagar
71	2021	Kalimantan Utara	Tana' Tidung	Sesayap Hilir	Bandan Bikis
72	2021	Kalimantan Utara	Tana' Tidung	Sesayap Hilir	Bebatu
73	2021	Kalimantan Utara	Tana' Tidung	Sesayap Hilir	Sengkong
74	2021	Riau	Indragiri Hilir (Inhil)	Gaung	Simpang Gaung
75	2021	Riau	Indragiri Hilir (Inhil)	Gaung	Teluk Kabung
76	2021	Riau	Indragiri Hilir (Inhil)	Gaung Anak Serka	Rambaian
77	2021	Riau	Indragiri Hilir (Inhil)	Kempas	Bayas Jaya
78	2021	Riau	Indragiri Hilir (Inhil)	Kempas	Kerta Jaya
79	2021	Riau	Indragiri Hilir (Inhil)	Kempas	Sungai Rabbit
80	2021	Riau	Indragiri Hulu	Kuala Cenaku	Pulau Jumat
81	2021	Riau	Indragiri Hulu	Rengat Barat	Redang
82	2021	Riau	Indragiri Hulu	Rengat Barat	Sialang Dua Dahan
83	2021	Riau	Indragiri Hulu	Tebing Tinggi Timur	Tanjung Sari
84	2021	Riau	Pelalawan	Kerumutan	Kerumutan
85	2021	Riau	Pelalawan	Kerumutan	Mak Teduh
86	2021	Riau	Pelalawan	Teluk Meranti	Pulau Muda
87	2021	Riau	Pelalawan	Teluk Meranti	Teluk Meranti
88	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Tanjung Mulia
89	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji
90	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji I
91	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji II
92	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji III
93	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji IV
94	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Hilir	Sei Apung
95	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Hilir	Teluk Binjai
96	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Hulu	Sonomartani

NO	TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
97	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Leidong	Air Hitam
98	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Leidong	Kelapa Sebatang
99	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Leidong	Pangkalan Lunang
100	2021	Sumatera Utara	Labuhanbatu Utara	Kualuh Leidong	Teluk Pulai Dalam
101	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Batahan	Kel. Pasar Baru Batahan
102	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Batahan	Kuala Betahan
103	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Pasar I Singkuang
104	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Pasar II Singkuang
105	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Salebaru
106	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Tabuyung
107	2021	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	UPT Tabuyung
108	2022	Aceh	Aceh Barat	Johan Pahlawan	Leuhan
109	2022	Aceh	Aceh Barat	Kaway XVI	Peunia
110	2022	Aceh	Aceh Barat	Kaway XVI	Simpang
111	2022	Aceh	Aceh Jaya	Teunom	Batee Roo
112	2022	Aceh	Aceh Jaya	Teunom	Tanoh Anou
113	2022	Aceh	Nagan Raya	Kuala Pesisir	Kuala Baro
114	2022	Aceh	Nagan Raya	Kuala Pesisir	Kuala Trang
115	2022	Aceh	Nagan Raya	Kuala Pesisir	Padang Panyang
116	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Jongkat	Jongkat
117	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Jongkat	Sungai Nipah
118	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Jongkat	Wajok Hilir
119	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Mempawah Hilir	Sengkubang
120	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Mempawah Timur	Antibar
121	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Mempawah Timur	Sejegi
122	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Sungai Kunyit	Semparong Parit Raden
123	2022	Kalimantan Barat	Mempawah	Sungai Kunyit	Semudun
124	2022	Kalimantan Barat	Sanggau	Tayan Hilir	Lalang
125	2022	Kalimantan Barat	Sanggau	Toba	Balai Belungai
126	2022	Kalimantan Barat	Sintang	Dedai	Sungai Mali
127	2022	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Banjang	Pawalutan
128	2022	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Banjang	Pulau Damar
129	2022	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Pabaungan Hulu
130	2022	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas
131	2022	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Pilang
132	2022	Kalimantan Tengah	Pulang Pisau	Jabiren Raya	Tumbang Nusa
133	2022	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Puan Cepak
134	2022	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Muara Ancalong	Senyuir
135	2022	Kalimantan Timur	Kutai Timur	Muara Bengkal	Mulupan
136	2022	Papua	Merauke	Jagebob	Jagebob Raya
137	2022	Papua	Merauke	Jagebob	Kartini
138	2022	Papua	Merauke	Tanah Miring	Sermayam Indah
139	2022	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Campaloga
140	2022	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Rantemario
141	2022	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Tommo
142	2022	Sumatera Selatan	Banyuasin	Air Salek	Saleh Jaya
143	2022	Sumatera Selatan	Banyuasin	Air Salek	Saleh Mulya
144	2022	Sumatera Selatan	Banyuasin	Makarti Jaya	Delta Upang
145	2022	Sumatera Selatan	PALI	Abab	Perambatan
146	2022	Sumatera Selatan	PALI	Penukal	Air Itam Timur
147	2022	Sumatera Selatan	PALI	Penukal Utara	Tempirai
148	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Desa Teluk Panji II
149	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Tanjung Mulia
150	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji 3
151	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji 4
152	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Aek Kuo	Aek Korsik
153	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Hilir	Kampung Mesjid
154	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Hilir	Sei Apung
155	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Hilir	Sei Sentang
156	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Hulu	Sonomartini
157	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Hulu	Sukarame Baru
158	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Leidong	Air Hitam

NO	TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
159	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Leidong	Teluk Pulai Dalam
160	2022	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Marbau	Aek Hitetoras
161	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Batahan	Kuala Batahan
162	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Batahan	Pasar Baru Batahan
163	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Pasar Singkuang II
164	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Salibaru
165	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Tabuyung
166	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	UPT Tabuyung
167	2022	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Natal	Desa Pasar V Natal
168	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Kualuh Hulu	Sukarame Baru
169	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Aek Kuo	Aek Korsik
170	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Aek Kuo	Aek Hitetoras
171	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu Utara	Aek Kuo	Sei Sentang
172	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu	Panai Tengah	Pasar Tiga
173	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu	Panai Tengah	Telaga Suka
174	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu	Panai Tengah	Sei Nahodaris
175	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu	Panai Tengah	Bagan Bilah
176	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji II
177	2023	Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji III
178	2023	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	Muara Batang Toru	Muara Manompas
179	2023	Sumatera Utara	Tapanuli Selatan	Muara Batang Toru	Terapung Raya
180	2023	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Sikapas
181	2023	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	UPT Singkuang SP 1
182	2023	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	UPT Singkuang SP 2
183	2023	Sumatera Utara	Mandailing Natal	Muara Batang Gadis	Sali Baru
184	2023	Sumatera Selatan	Banyuasin	Muara Padang	Tirtoraharjo
185	2023	Sumatera Selatan	Banyuasin	Muara Padang	Air Gading
186	2023	Sumatera Selatan	Banyuasin	Muara Padang	Sidomulyo
187	2023	Sumatera Selatan	PALI	Abab	Prambatan
188	2023	Sumatera Selatan	PALI	Penukal Utara	Tempirai
189	2023	Sumatera Selatan	PALI	Penukal	Air Itam Timur
190	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Bumi Ratu
191	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Gedung Karya Jitu
192	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Hargo Mulyo
193	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Hargo Rejo
194	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Karya Jitu Mukti
195	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Medasari
196	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Wono Agung
197	2023	Lampung	Tulang Bawang	Rawajitu Selatan	Yudha Karya Jitu
198	2023	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Banjang	Pawalutan
199	2023	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Utara	Banjang	Pulau Damar
200	2023	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas
201	2023	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Sungai Rutas Hulu
202	2023	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Marampiau
203	2023	Kalimantan Selatan	Tapin	Candi Laras Selatan	Baringin
204	2023	Kalimantan Selatan	Hulu Sungai Tengah	Batang Alai Utara	Awang
205	2023	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kuala Mandor B	Retok
206	2023	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Kuala Mandor B	Kuala Mandor A
207	2023	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Sungai Ambawang	Teluk Bakung
208	2023	Kalimantan Barat	Kubu Raya	Sungai Ambawang	Lingga
209	2023	Kalimantan Barat	Mempawah	Sadaniang	Sekabuk
210	2023	Kalimantan Barat	Mempawah	Mempawah Timur	Antibar
211	2023	Kalimantan Barat	Mempawah	Sungai Kunyit	Semparong Parit Raden
212	2023	Kalimantan Barat	Mempawah	Mempawah Hilir	Sengkubang
213	2023	Kalimantan Barat	Mempawah	Sungai Kunyit	Mendalok
214	2023	Kalimantan Tengah	Kapuas	Kapuas Barat	Pantai
215	2023	Kalimantan Tengah	Kapuas	Basarang	Batu Nindan
216	2023	Kalimantan Tengah	Kapuas	Bataguh	Budi Mufakat
217	2023	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Sabintulung
218	2023	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Sedulung
219	2023	Kalimantan Timur	Kutai Kartanegara	Muara Kaman	Liang Buaya
220	2023	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Buana Sakti

NO	TAHUN	PROVINSI	KABUPATEN	KECAMATAN	DESA
221	2023	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Tamemongga
222	2023	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Tamejarra
223	2023	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Leling Barat
224	2023	Sulawesi Barat	Mamuju	Tommo	Leling Utara
225	2023	Papua	Merauke	Tanah Miring	Sermayam Indah
226	2023	Papua	Merauke	Kurik	Sumber Mulya
227	2023	Papua	Merauke	Kurik	Kaliki



**Gambar 10.** Pembuatan Gula Merah dari Nira Sawit di Sumatera Utara



**Gambar 11.** Peternakan Ayam di Sumatera Utara



**Gambar 12.** Peternakan Sapi di Sumatera Selatan



**Gambar 75.** Budidaya Kerbau Rawa di Sumatera Selatan



**Gambar 76.** Budidaya Ikan Lele di Sumatera Utara

### 9. Luas Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang Dipulihkan di Lahan Masyarakat

Pada tahun 2023, Direktorat Jenderal PPKL melaksanakan pembangunan sekat kanal di Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara sejumlah 38 unit sekat kanal. Dari total pembangunan 38 unit sekat kanal tersebut, areal ekosistem gambut yang terbasahi mencapai 1.105 hektar. Pelaksanaan Pembangunan sekat kanal tersebut dilakukan dengan cara swakelola dengan kelompok masyarakat, yaitu Tim Kerja Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (TK-PPEG) yang dibentuk pada pelaksanaan program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG). Rincian sekat kanal yang dibangun di Provinsi Sumatera Utara disajikan dalam Tabel 54. Berikut

**Tabel 19.** Sebaran Lokasi Pembangunan Sekat Kanal Tahun 2023

Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)	Jumlah Sekat Kanal (Unit)	Luasan Terbasahi (Ha)	Tahun Pembuatan
Sumatera Utara	Labuhan Batu Selatan	Kampung Rakyat	Teluk Panji II	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	5	150	2023
			Teluk Panji III	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	6	180	2023
			UPT Singkuang SP 1	KHG Aek Siriam - Batang Singkuang	5	135	2023
			UPT Singkuang SP 2	KHG Aek Siriam - Batang Singkuang	10	305	2023
	Labuhan Batu	Panai Tengah	Sei Nahodaris	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	5	140	2023
			Bagan Bilah	KHG Sungai Barumun - Sungai Kubu	7	195	2023
<b>TOTAL</b>					<b>38</b>	<b>1.105</b>	

Beberapa dokumentasi pembangunan sekat kanal di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 disajikan pada Gambar 67 – 72 berikut ini.



**Gambar 15.** Mutual Check Pra Pembangunan Sekat Kanal



**Gambar 16.** Mobilisasi Material untuk Pembangunan Sekat Kanal



**Gambar 17.** Pemasangan Cerucuk, Geotextille dan Soilbag pada Pembangunan Sekat Kanal



**Gambar 18.** Pemasangan Papan Peluncur pada Pembangunan Sekat Kanal



**Gambar 19.** Sekat Kanal Selesai Dibangun

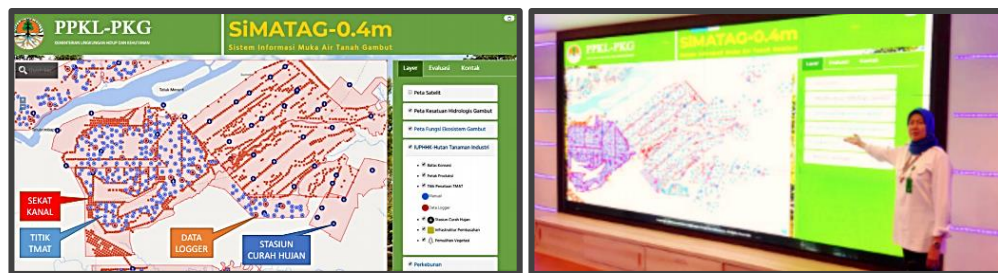


**Gambar 20.** Sekat Kanal Selesai Dibangun

Kegiatan pemulihan kualitas ekosistem gambut juga didukung dari data penginderaan jarak jauh yang diperoleh dari berbagai sumber sistem informasi data, yakni diantaranya adalah SiMATAG-0,4m dan SiPPEG.

- **SiMATAG-0,4m**

SiMATAG-0,4m (Sistem Informasi Muka Air Tanah Gambut 0,4 meter) adalah sistem informasi pengelolaan data muka air tanah gambut. SiMATAG-0,4m diluncurkan pada acara Asia-Pacific Forestry Week (APFW) 2019 di Incheon-Korea Selatan, dalam Stream-5, tanggal 18 Juni 2019. Sistem ini dibangun KLHK sebagai upaya monitoring tingkat keberhasilan pelaksanaan pemulihan fungsi Ekosistem Gambut melalui pengumpulan database pemantauan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) dan curah hujan di areal konsesi maupun lahan masyarakat.



**Gambar 21.** Demonstrasi Aplikasi SiMATAG-0,4 m

Database tersebut mengelola data pemantauan dari 10.771 titik pengamatan Tinggi Muka Air Tanah (TMAT) yang tersebar di seluruh Indonesia dan diupdate secara kontinyu melalui aplikasi gawai (mobile application based). Informasi dari database tersebut dapat digunakan untuk mengetahui pemenuhan kewajiban pelaksanaan tata kelola air perusahaan dengan indikator data pemantauan tinggi muka air tanah (TMAT)  $\leq 0,4$  meter.

- **SiPPEG**

Dalam rangka mendukung upaya pengelolaan kerusakan ekosistem gambut, Direktorat PKEG membuat sistem Sistem Informasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (SiPPEG) yang memiliki tujuan utama sebagai wadah penyajian informasi dan data seputar perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia yang dapat diakses oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan pemegang izin konsesi, dan masyarakat umum/ publik. SiPPEG juga dapat dimanfaatkan sebagai sistem pendukung analisis dan pengambilan keputusan.

Adapun data dalam bentuk spasial maupun non spasial yang diolah dan ditampilkan SiPPEG mencakup sebagai berikut:

- a. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (*IKEG/Peat Environmental Performance Index*);
  - b. Neraca air (*water balance*);
  - c. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (*RPPEG/Planning for Protection and Management of Peat Ecosystem*);
  - d. Kinerja perusahaan dalam tata kelola air (*PROPER/Peat Environmental Performance Rating for Concession*);
  - e. Pengawasan dan penegakan hukum (*WASGAKUM/Surveillance and Law Enforcement*)
  - f. Reduksi emisi gas rumah kaca (*GHG reduction*); dan
  - g. Sistem peringatan dini (*EWS/early warning system*) kebakaran hutan dan lahan.
- **Hotspot**

Hotspot merupakan suatu area yang memiliki suhu lebih tinggi dibandingkan dengan sekitarnya yang dapat dideteksi oleh satelit. Area tersebut direpresentasikan dalam suatu titik yang memiliki koordinat tertentu.

Beberapa satelit yang digunakan untuk mendeteksi hotspot/titik panas adalah Satelit NOAA, Terra/Aqua MODIS, maupun data satelit penginderaan jauh. Saat ini, data inilah yang paling efektif dalam memantau kebakaran lahan dan hutan untuk wilayah yang luas dan cepat. Teknologi satelit penginderaan jauh saat ini memungkinkan memantau kebakaran lahan dan hutan secara real time.

Data Hotspot SiPPEG mengolah data hotspot dari satelit Terra/Aqua dalam rentang waktu 2018 sampai 2023 di 6 provinsi prioritas (rawan terbakar dan memiliki luasan ekosistem gambut yang besar) yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

- **Karhutla di Sumatera Selatan**

El Nino merupakan siklus alami yang ditandai dengan meningkatnya suhu perairan di Pasifik timur dan tengah sehingga meningkatkan suhu dan kelembaban atmosfer di atasnya. Peristiwa ini menyebabkan pembentukan awan yang juga meningkatkan curah hujan di bagian selatan Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian selatan, Tanduk Afrika, dan Asia Tengah. Sebaliknya,

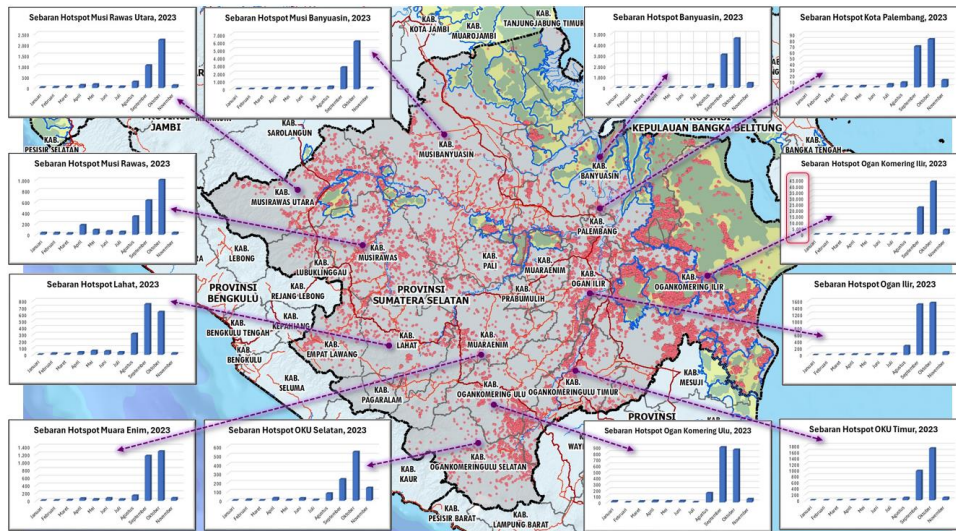


El Nino juga dapat menyebabkan kekeringan parah di Australia, Indonesia, dan sebagian Asia Selatan.

El Nino yang berulang di masa lalu kerap dikaitkan dengan intensitas kebakaran hutan di Indonesia. Misalnya, El Nino kuat yang terjadi pada 2015 telah memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hebat, menghancurkan 2,5 juta hektar (ha) hutan dan lahan Indonesia.

Kejadian El Nino pada tahun 2023 ditandai dengan panjangnya musim kemarau ekstrim dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kejadian El Nino ini mengakibatkan banyaknya kebakaran hutan dan lahan hampir di seluruh Indonesia.

Melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 502 Tahun 2023 tentang Tim SUpervisi Dalkarhutla 2023, Ditjen PPKL ditunjuk sebagai salah satu anggota pada tim pendampingan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Daerah Tahun 2023 untuk Provinsi Sumatera Selatan. Kejadian Karhutla di Provinsi Sumatera Selatan dapat diamati dari tingkat hotspot / titik panas yang disajikan pada Gambar 84 berikut.



**Gambar 22.** Frekuensi dan Sebaran Titik Panas (Hotspot) periode Januari – November 2023 di Provinsi Sumatera Selatan

Ditjen PPKL melakukan intervensi karhutla secara langsung di beberapa lokasi, salah satunya di lahan masyarakat di desa tanjung menang, kecamatan kayu agung, kabupaten ogan komering ilir, adapun intervensi yang dilakukan adalah:

- Pembangunan beberapa sekat kanal
- Pemberian bantuan pompa air skala besar
- Inisiasi DMPG



**Gambar 88.** Aksi Pembasahan (Rewetting System) Melalui Pembangunan Sekat Kanal di Lahan Masyarakat, Desa Tanjung Menang, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Tahun 2023

#### 10. Dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi, RKAKL, Pelaporan E-Monev Bappenas, dan Pelaporan Kinerja Direktorat PKEG

Dalam kegiatan pengendalian kerusakan gambut dibutuhkan rencana kerja atas pelaksanaan yang akan dilakukan. Rencana yang dibuat dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 5 tahunan, Rencana Kerja (Renja) 1 tahun, Rencana Aksi, dan Rencana Kerja. Sampai dengan triwulan IV telah dilakukan pembuatan dokumen Renja, Rencana Aksi, revisi Renstra, dan RKAKL.

#### 11. Dokumen Desain SPIP dan Laporan Triwulan

Dalam kegiatan pengendalian kerusakan gambut dibutuhkan evaluasi atas pelaksanaan yang telah dilakukan. Setelah pelaksanaan kegiatan yang dimaksud dalam rencana yang telah dibuat dituangkan ke dalam laporan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, selain itu juga dilakukan pelaporan secara elektronik ke dalam website Bappenas (<https://e-monev.bappenas.go.id>) dan dilaporkan kepada DJA. Sampai dengan triwulan IV telah dilakukan pelaporan bulan Januari-Desember 2023.

Pada tahun 2023, Laporan Penyelenggaraan SPIP Triwulan IV tahun 2023 telah selesai dibuat dan disetujui oleh penanggung jawab satuan tugas penyelenggaraan SPIP Direktorat PKEG

yang dalam hal ini adalah Direktur PKG. Kemudian dokumen yang dimaksud juga diinput ke dalam website <https://simawas.menlhk.go.id/spip> sebagai laporan kepada Inspektorat Jenderal.

## **12. Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Staf**

Pada tahun 2023 kegiatan pembinaan staf / dialog kinerja telah dilakukan sebanyak 4 kali yaitu penyusunan desain SPIP Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, penyusunan proses bisnis Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, rapat pembahasan progres kegiatan per B06, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023.

## **13. Jumlah Provinsi & Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Kebijakan, Rencana, dan Program Gambut Lestari dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG)**

Pengisian Indeks Respon Kinerja Daerah pada aplikasi Gambut Lestari telah disuarkan sebanyak dua kali secara daring kepada perwakilan-perwakilan pemerintah daerah yakni 24 Provinsi dan 134 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang tergolong sebagai daerah yang terdapat KHG.

## **C. Capaian Realisasi Anggaran**

Capaian realisasi anggaran (APBN + Hibah) Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 31.361.424.683 (tiga puluh satu milyar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah). Secara rinci capaian penyerapan anggaran untuk masing-masing indikator kegiatan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 23.** Capaian Penyerapan Anggaran (APBN dan Hibah) Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023

KODE	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	SISA DANA	PERSEN %
		<b>32.777.390.000</b>	<b>31.361.424.683</b>	<b>1.415.965.317</b>	<b>95,68</b>
<b>6033.QM A.006</b>	<b>Data dan Informasi Kesatuan Hidrologis Gambut</b>	<b>17.101.476.000</b>	<b>15.755.555.971</b>	<b>1.345.920.029</b>	<b>92,13</b>
51	Tersedianya Peta Kesatuan Hidrologis Gambut skala 1:50.000	16.585.566.000	15.249.319.931	1.336.246.069	91,94
A	Inventarisasi Karakteristik Ekosistem Gambut pada Kesatuan Hidrologis Gambut	1.516.636.000	1.512.975.238	3.660.762	99,76
B	Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000 pada Kesatuan Hidrologis Gambut	73.154.000	72.143.000	1.011.000	98,62
C	Pencadangan Anggaran				
D	INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI), C.1 Kapasitas Kelembagaan, kerangka kerja Kemitraan untuk meningkatkan operasional restorasi lahan gambut yang berkelanjutan	4.245.904.000	3.706.875.230	539.028.770	87,30
E	INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI), C.2 Pengelolaan terpadu Kesatuan Hidrologis Gambut prioritas di provinsi Proyek berkelanjutan	7.857.906.000	7.206.969.552	650.936.448	91,72
F	INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDSCAPES IN INDONESIA (IMPLI), C.4 PMO Project Management	1.149.537.000	1.008.542.658	140.994.342	87,73
G	Sustainable Management of Peatland Ecosystems in Indonesia (SMPEI)	1.722.465.000	1.721.947.253	517.747	99,97
H	INTEGRATED MANAGEMENT PEATLAND LANDS	19.964.000	19.867.000	97.000	99,51
52	Peningkatan Kapasitas Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	515.910.000	506.236.040	9.673.960	98,12
A	Perhitungan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	143.378.000	137.333.120	6.044.880	95,78
B	Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut	372.532.000	368.902.920	3.629.080	99,03
<b>6034.QD I.004</b>	<b>Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut</b>	<b>443.200.000</b>	<b>431.977.584</b>	<b>11.222.416</b>	<b>97,47</b>
51	Layanan Penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	443.200.000	431.977.584	11.222.416	97,47
A	Peningkatan Kinerja Pemulihan Ekosistem Gambut	250.914.000	249.281.237	1.632.763	99,35
B	Penilaian Kinerja Perusahaan dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	192.286.000	182.696.347	9.589.653	95,01
C	Pencadangan Anggaran				
<b>6035.RE A.002</b>	<b>Lahan Gambut Terdegradasi dipulihkan di Areal Penggunaan Lainnya</b>	<b>1.814.696.000</b>	<b>1.779.360.198</b>	<b>35.335.802</b>	<b>98,05</b>
51	Pemulihan Lahan Gambut Terdegradasi di Areal Penggunaan Lainnya	1.814.696.000	1.779.360.198	35.335.802	98,05

KODE	URAIAN	JUMLAH	REALISASI	SISA DANA	PERSEN %
A	Pemulihan Fungsi Ekosistem Gambut Berbasis Masyarakat	1.814.696.000	1.779.360.198	35.335.802	98,05
B	Pencadangan Anggaran				
<b>6035.UB A.002</b>	<b>Layanan Kinerja Kab/Kota dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut</b>	<b>680.420.000</b>	<b>674.597.995</b>	<b>5.822.005</b>	<b>99,14</b>
51	Pelaksanaan Gerakan Gambut Lestari	680.420.000	674.597.995	5.822.005	99,14
A	Indeks Respon Kinerja Daerah (IRKD)	235.139.000	234.825.870	313.130	99,87
B	Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	445.281.000	439.772.125	5.508.875	98,76
C	Pencadangan Anggaran				
<b>6035.UB B.001</b>	<b>Desa Mandiri Peduli Gambut yang Difasilitasi</b>	<b>12.737.598.000</b>	<b>12.719.932.935</b>	<b>17.665.065</b>	<b>99,86</b>
51	Fasilitasi desa dalam menjaga ekosistem gambut	12.737.598.000	12.719.932.935	17.665.065	99,86
A	Pembentukan Desa Mandiri Peduli Gambut	12.737.598.000	12.719.932.935	17.665.065	99,86
B	Pencadangan Anggaran				

#### D. Capaian Efisiensi Kinerja

Efisiensi kinerja untuk mencapai sasaran kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023 diperoleh dengan cara membandingkan antara Capaian Kinerja dengan Capaian Penyerapan Anggaran pada masing-masing indikator kegiatan.

**Tabel 25.** Efisiensi Kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas Ekosistem Gambut	Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	IKEG = 67,3	IKEG = 69,13	102,71%
2.	Tersedianya Data dan Informasi Pemantauan Kualitas Lingkungan	Jumlah KHG yang diinventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut-nya pada skala 1:50.000	48 KHG	48 KHG	100%
		Jumlah KHG yang ditetapkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut skala 1:50.000	30 KHG	30 KHG	100%
		Jumlah provinsi dan kabupaten/kota yang difasilitasi peningkatan kapasitas perencanaan perlindungan dan pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG)	12 layanan	12 layanan	100%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)	(4)
3.	Terlaksananya layanan penilaian Kinerja Industri dalam Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut	Jumlah industri yang dilakukan penilaian kinerja pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut	330 Perusahaan	330 Perusahaan	100%
4.	Terpulihkannya KHG yang terdegradasi	Luas KHG (Ha) yang dipulihkan di areal penggunaan lainnya (lahan masyarakat)	1.050 Hektar	1.105 Hektar	105,23%
5.	Terfasilitasinya dan terbinanya pemerintah daerah dalam pengendalian kerusakan Ekosistem Gambut	Jumlah desa yang difasilitasi dalam menjaga Ekosistem Gambut	60 Desa	60 Desa	100%
		Tersedianya Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut di provinsi dan kabupaten/kota	23 Provinsi 134 kabupaten/kota	23 Provinsi 134 kabupaten/kota	100%
		Jumlah pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan program Gambut Lestari	23 Provinsi 134 kabupaten/kota	23 Provinsi 134 kabupaten/kota	100%
6.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Direktorat PKEG	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai SAKIP = 78	Nilai SAKIP = 77,39	99,21%
7.	Terlaksananya Penyelenggaraan SPIP tahun 2023	Jumlah kegiatan penyelenggaraan SPIP	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
8.	Terlaksananya Dialog Kinerja	Jumlah pelaksanaan Dialog Kinerja	3 Pertemuan	3 Pertemuan	100%

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat nilai rata-rata efisiensi kinerja Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut sampai dengan akhir Triwulan IV Tahun 2023 adalah sebesar 100,59% yang menunjukkan serapan anggarannya efisien sesuai dengan anggaran yang ada.

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

- 1 Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut memiliki 8 (delapan) sasaran dan 12 (dua belas) indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023.
- 2 Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022, diperoleh Capaian Kinerja rata-rata sebesar 100,59% sedangkan capaian Penyerapan Anggaran APBN adalah 99,53% untuk APBN Murni dan 95,68% untuk APBN + Hibah;

### **B. Kendala**

- 1 Tahun 2023 Dit PKEG mengalami pengesahan anggaran yang terhambat
- 2 Perlu pencermatan ulang terhadap usulan alokasi anggaran anggaran hibah 2023.
- 3 Perlunya peningkatan kompetensi SDM dalam hal pengelolaan administrasi dan keuangan dasar.

### **C. Tindak Lanjut**

- 1 Tempo pekerjaan dipercepat untuk mengejar ketertinggalan start.
- 2 Pencermatan ulang alokasi hibah dilakukan secara seksama dengan tempo yang sesingkat-singkatnya di pertengahan tahun.
- 3 Akan dilakukan peniingkatan kompetensi SDM staf Dit PKEG perihal pembekalan administrasi dan keuangan dasar.